

BAB II PERKEMBANGAN INVESTASI CINA DI LUAR NEGERI

II.1. Dari Gaige Kaifang sampai upaya Investasi Langsung Keluar Negeri

Cina merupakan negara terbesar di kawasan Asia Pasifik dan salah satu negara keempat terluas di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduknya yang saat ini mencapai sekitar 1,3 milyar jiwa merupakan yang terbanyak di dunia, serta dapat dikategorikan sebagai negara terpadat di muka bumi ini. Berdasarkan kondisi ini, terutama dalam hal jumlah penduduk dan luas wilayahnya¹, Cina memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan perekonomiannya, bahkan perekonomian Cina dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan ekonomi dengan skala satu benua bukan pada skala satu negara. Dewasa ini pertumbuhan ekonomi Cina begitu signifikan, yaitu dari hanya 3,1% pada tahun 1980 menjadi 16% pada tahun 2007, sehingga perekonomian Cina dewasa ini cukup berpengaruh di dunia.²

Sejak awal berdirinya yaitu tanggal 1 Oktober 1949, Cina memproklamasikan dirinya sebagai negara yang menganut ideologi sosialis dengan nama Republik Rakyat Cina (*People Republic of China/ Zhonghua Renmin Gongheguo* 中华人民共和国), dengan Mao Zedong 毛泽东 sebagai pemimpin tertingginya. Selama masa kekuasaannya berbagai hal yang berhubungan dengan kapitalisme sangat ditentang dan bahkan harus dihancurkan. Namun, perubahan yang terjadi dewasa ini berbanding terbalik dengan masa-masa tersebut. Kehidupan masyarakat Cina dewasa ini cenderung menuju ke arah masyarakat kapitalis. Hal ini berkaitan erat dengan reformasi di berbagai bidang yang dilakukan oleh Cina setelah Mao meninggal dunia pada tahun 1976. Saat itu Deng Xiaoping 邓小平, yang merupakan

¹ Luas daratan Cina yaitu 9,596,960 juta km² dengan panjang garis perbatasan lebih dari 20.000 km. (Lihat dalam Bai Shouyi, *An Outline History of China*, (Beijing: Foreign Language Press, 1982), hal. 1 dan CIA *The World Factbook*)

² Poltak Hotradero, "Pertumbuhan Ekonomi Cina dan Tantangannya", makalah pada seminar yang dilakukan Center for Chinese Studies FIB-UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 25 Februari 2008.

tokoh pembaharuan Cina tampil untuk mengatur kembali negara Cina yang telah mengalami pergulatan politik.

Tahap awal pembaharuan Cina dimulai ketika Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral IX bulan Desember 1978, yang menetapkan kebijakan utama (开放政策 *kaifang zhengce*) untuk memajukan perekonomian Cina yaitu Cina yang membuka diri terhadap dunia internasional. Kebijakan itu dikenal dengan nama “reformasi dan membuka diri” (改革开放 *Gaige Kaifang*)³, yang bertujuan untuk menjadikan Cina lebih baru dan membawa Cina menuju sebuah negara yang makmur dan maju. Kebijakan ini dipertegas pula dengan adanya pidato Deng Xiaoping yang disampaikan di hadapan Kongres Nasional Partai Komunis pada tahun 1982, yang memperkenalkan rumusan baru yang kemudian dikenal sebagai “sosialisme berkarakteristik Cina (*Socialism with Chinese Characteristic/ 中国特色的社会主义 Zhongguo Tese de Shehui Zhuyi*). Adapun penggalan pidato tersebut berbunyi:

“Dalam melaksanakan program modernisasi, kita harus berangkat dari kenyataan-kenyataan di Cina. Dalam reformasi maupun pembangunan, kita juga harus belajar dari negara-negara asing dan mengambil hikmahnya, tetapi penerapan mekanis pengalaman asing dan peniruan model-model asing tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita telah menarik banyak pelajaran dalam hal ini. Kita harus menggabungkan kebenaran universal Marxisme dengan kenyataan-kenyataan konkret Cina, merintis jalan kita sendiri, dan membangun sosialisme dengan karakteristik Cina--- itulah kesimpulan dasar yang telah kita capai setelah mempelajari sejarah kita yang panjang tersebut.”⁴

Gagasan yang bertujuan untuk mereformasi perekonomian di dalam negeri serta mempromosikan ekspansi hubungan ekonomi Cina dengan negara-negara lain di dunia ini, mulai memunculkan berbagai macam slogan di kalangan pemerintah dan kemudian menjadi populer juga di masyarakat luas. Slogan-slogan itu dimaksudkan

³ I. Wibowo, *Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) hal. 3

⁴ Ted C. Fishman, “Temuilah George Jetson di Beijing”, *China*Inc*, Marianto Samosir (Penerjemah), (Jakarta: PT Elex Media Computindo), hal. 100-101.

untuk menyemangati rakyat agar dapat turut serta dalam membangun perekonomian negara. Slogan “sosialisme bukan berarti kemiskinan” (社会主义不意味着贫穷 *shehui zhuyi bu yiweizhe pinqiong*) serta slogan “menjadikan sebagian kecil orang menjadi kaya untuk kemudian menjadikan semua orang juga kaya” (使少数人变成富人，以后使所有的人变成富人 *shi shaoshuren biancheng furen, yihou shi suoyou de ren biancheng furen*) dikampanyekan oleh Deng bersamaan dengan program reformasi dan keterbukaannya.⁵ Pengejaran materi pun menjadi tema utama kehidupan orang Cina, yang menyebabkan mereka memiliki semangat berkompetisi yang tinggi, slogan “kaya itu mulia” (致富是光荣 *zhifu shi guangrong*) yang juga didengungkan oleh Deng, telah mengubah pandangan rakyat menjadi lebih berorientasi pada kekayaan materi.⁶

Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan dibukanya keran investasi di Cina, menimbulkan dampak pada keterlibatan pihak asing dalam perekonomian Cina. Pada periode ini mulai masuk modal asing untuk ditanamkan ke berbagai sektor di Cina. Ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan keterbukaan yang mengakibatkan gelombang kapitalisme menyerbu Cina.⁷ Penerapan kebijakan “reformasi dan membuka diri”, menjadikan Cina sebagai salah satu negara sasaran investasi negara-negara industri besar dunia, seperti negara-negara Uni Eropa dan Amerika Utara. Bahkan negara-negara industri maju di Asia Pasifik yang dikenal dengan sebutan NICs (*New Industrialized Countries*), seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang juga turut menanamkan modalnya di Cina.⁸ Selain itu, untuk mendukung program tersebut, pemerintah Cina juga berperan dalam mengatur kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalam negeri, yaitu dengan

⁵ Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi*, (Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1995), hal. 11

⁶ Wibowo, *Op.cit*, hal. 82

⁷ Partogi, *Op.cit*, hal. 11

⁸ Jude Howell, *China Open Its Doors: The Politics of Economic Transisition*, (Colorado: Lynne Rienner Publishers. Inc,1993) hal.24; Lihat juga Opcit, Wibowo, hal. 33

menyesuaikan hukum-hukum yang ada dan melibatkan diri dalam pemberian izin kepada para investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Cina.

Adapun proses penyesuaian hukum di Cina dalam mendukung adanya investasi asing yang masuk adalah sebagai berikut:⁹

1. Pada tanggal 1 Juli 1979, Kongres Rakyat Nasional¹⁰ Kelima memberlakukan “Undang-Undang Republik Rakyat Cina tentang Usaha Patungan Cina-Asing” (*the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures*). Undang-undang ini memberikan landasan untuk berinvestasi di Cina lewat usaha patungan. Undang-undang ini juga mengatur struktur yang ada di sepanjang lini perusahaan, baik dewan direksi, personil hukum, kewajiban perusahaan, maupun kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak ke dalam usaha patungan tersebut. Konsep ini merupakan terobosan yang luar biasa dan belum pernah ada di Cina sebelumnya.
2. Pada tanggal 20 September 1983, Dewan Negara¹¹ memberlakukan “Peraturan Pelaksanaan Usaha Patungan” (*Regulations for the Implementation of the Joint Venture Law*). Peraturan-peraturan ini memberikan rincian prosedural untuk pembentukan usaha patungan, pengkontribusi modal, pengalihan teknologi, dan pengoperasian dari dewan direksi.

⁹ Laurence J. Brahm, *China's Century (Abadnya Tiongkok): Bangkitnya Kekuatan Ekonomi Berikutnya*, Alvin Saputra (Penerjemah), (Batam: Penerbit Interaksara, 2002), hal. 177-180

¹⁰ Kongres Rakyat Nasional RRC adalah lembaga tertinggi negara di mana terdapat wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Lembaga ini merupakan lembaga tertinggi di Cina, tempat UUD maupun UU ditetapkan, presiden maupun perdana menteri dipilih, dsb. (Lihat di Wibowo *Op.cit*, hal.125-128.) Kongres Rakyat Nasional tersebut diselenggarakan di Balai Agung Rakyat, Beijing. Kongres Rakyat Nasional berkumpul setiap tahun dengan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (KKPRC).

¹¹ Dewan Negara RRC adalah instansi administrasi negara tertinggi yang melaksanakan UU yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional RRC serta Komite tetap dan resolusi yang diluluskannya, bertanggung jawab terhadap dan melaporkan pekerjaan kepada Kongres Rakyat Nasional RRC beserta Komite tetapnya. Dewan Negara berhak menetapkan peraturan administrasi, mengeluarkan keputusan dan perintah. Dewan Negara terdiri dari perdana menteri, 4 wakil perdana menteri, 5 penasehat negara, anggota dewan negara, berbagai menteri, menteri berbagai komisi, auditor jenderal dan Sekretaris Jenderal. (Lihat di 中国百科 China ABC <http://www.indonesian.cri.cn>) Dewan Negara bertemu sekali sebulan dan Komite tetapnya bertemu dua kali seminggu.

3. Pada tanggal 4 April 1990, Kongres Rakyat Nasional Ketujuh Sidang Ketiga merevisi Undang-Undang Usaha Patungan (*the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures*) tahun 1979. Undang-undang ini direvisi untuk memungkinkan pihak asing menunjuk seorang pimpinan tertinggi dari dewan direksi dan berbagai pihak untuk ikut dalam sebuah usaha patungan, yang sebelumnya dilarang menurut Undang-Undang Usaha Patungan (*the Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures*) tahun 1979.¹²
4. Sebelum Undang-Undang Usaha Patungan tahun 1979 direvisi, Peraturan Pelaksanan Usaha Patungan (*Regulations for the Implementation of the Joint Venture Law*) juga direvisi pada tanggal 15 Januari 1986 oleh Dewan Negara. Ini dilakukan untuk memungkinkan adanya usaha patungan yang beroperasi selama lima puluh tahun (sebelumnya dibatasi hanya selama dua puluh tahun).¹³
5. Setelah revisi Undang-Undang Usaha Patungan 1979 diberlakukan, banyak usaha patungan berdasarkan kontrak dibentuk dengan struktur kemitraaan. Oleh karena tidak adanya undang-undang yang spesifik, usaha-usaha ini tidak terlalu mengikuti konsep-konsep yang dipaparkan dalam Undang-Undang Usaha Patungan. Untuk menjawab kekosongan dalam perundangan ini, maka pada tanggal 13 April 1988, Kongres Rakyat Nasional Ketujuh memberlakukan undang-undang mengenai “Usaha Patungan Koperasi Cina-Asing” (*Chinese-Foreign Cooperation Joint Venture/中外合作企业Zhong Wai Hezuo Qiye*) dan

¹² <http://www.china.org.cn/english/features/investment/36752.htm> diakses pada 18 Maret 2009 pukul 00.15 Wib

¹³ China Trade in Services (中国服务贸易指南网) atau lihat juga di http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/b/news_1212.shtml

diamandemen lagi pada Kongres Rakyat Nasional Kesembilan pada tanggal 31 Oktober 2000.¹⁴

6. Kongres Rakyat Nasional Keenam Sidang Keempat memberlakukan undang-undang mengenai “Usaha Investasi yang Sepenuhnya Milik Asing” (*Wholly Foreign-Owned Investment Enterprises/独资企业 Duzi Qiye*) pada tanggal 12 April 1986. Undang-undang ini memperbolehkan usaha-usaha kepemilikan asing didirikan di dalam negeri dan membentuk perusahaan-perusahaan induk yang sepenuhnya dimiliki asing untuk mengendalikan modal serta manajemen dalam berbagai investasi di Cina.¹⁵

Untuk lebih menjelaskan prosedur dalam mendirikan sebuah usaha investasi asing di Cina, pemerintah Cina menerapkan sejumlah peraturan yang dapat menjawab berbagai persoalan, seperti manajemen tenaga kerja, pendaftaran usaha patungan, dan kontribusi modal. Liberalisasi serta kelonggaran terhadap batasan-batasan dalam penanaman modal dan pendirian perusahaan-perusahaan di Cina, adalah sejalan dengan keinginan Cina untuk menerapkan kebijakan “reformasi dan membuka diri” dan mewujudkan keinginan Cina untuk dapat bergabung dalam keanggotaan WTO.¹⁶

Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi (*Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation/ MOFTEC*)¹⁷, Shi Guangsheng 石广生 (menjabat 1998 – 2003) mengumumkan suatu terobosan kunci yang akan merevolusi ruang lingkup investasi asing. Ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang

¹⁴ <http://openchina.com.es/wp-content/uploads/2007/07/chinese-foreign-cooperative-joint-ventures-law.pdf> diunduh pada 18 Maret 2009 pukul 00.05 Wib

¹⁵ Kemudian Peraturan ini direvisi lagi pada Pertemuan Kedelapan belas Komite Harian Kongres Rakyat Nasional (18th Meeting of the Standing Committee of the National People's Congress) lihat di www.china-tax.net/law/doc/FIE-n-company-law/PRC-Law-on-WFOE-2000.doc

¹⁶ Lunding Andreas. *Global Champions in Waiting: Perspectives on China's Overseas Direct Investment*. 2006. www.dbresearch.com (diakses pada 13 Mei 2008), hal. 4.

¹⁷ Sekarang Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi (*Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation/ MOFTEC*) bernama Kementerian Perdagangan (*Ministry of Commerce/ MOFCOM*) yang dijabat oleh Chen Deming 陈德铭

memungkinkan dan bahkan mendorong usaha-usaha investasi asing “yang memenuhi syarat” untuk mendaftarkan sahamnya di bursa saham yang ada di Cina.

Paradigma program reformasi di bidang ekonomi tampaknya membawa pengaruh terhadap dunia perdagangan dan investasi di Cina. Apalagi penerapan liberalisasi perekonomian dalam negeri Cina didukung oleh politik pintu terbuka yang berhubungan dengan perekonomian internasional.¹⁸ Pada tahun 2002, yaitu sepuluh tahun setelah Deng Xiaoping mempromosikan potensi ekonomi Cina melalui pidato dalam perjalanannya ke daerah selatan Cina (*nanxun jianghua* 南巡讲话) pada tahun 1992, usaha pemerintah Cina menarik investor asing berhasil mencatat sejarah baru dalam perkembangan investasi asing di berbagai negara di dunia. Bahkan prinsip Cina untuk tetap membuka jalan kapitalisme dalam menampung para investor asing, membuat negara-negara industri maju tetap menanamkan investasinya di Cina. Keadaan ini akhirnya menjadikan Cina sebagai negara penerima investasi asing (*host country*) terbesar¹⁹ dan perekonomian keenam terbesar²⁰ di dunia pada tahun 2002. Hal ini kontras dengan kenyataan yang terjadi di tengah merosotnya pemasukan investasi asing di negara lainnya di Asia.²¹

Adanya revisi dalam berbagai peraturan investasi di Cina, menyebabkan banyak perusahaan asing yang sebelumnya berinvestasi di negara-negara Asia lain melirik pasar dalam negeri Cina dan merelokasikan dananya ke Cina. Ini terjadi karena dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, Cina otomatis menjadi sebuah pasar raksasa yang menggiurkan, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan asing tersebut tidak mau kehilangan kesempatannya dalam berkompetisi di pasar dalam negeri Cina. Di lain pihak, dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing tersebut ke pasar dalam negeri Cina, juga memberi peluang bagi Cina untuk

¹⁸ Gordon White, *Riding The Tiger: The Politics of Economic Reform in Post-Mao Era*, (London: Mac Millan, 1993), hal. 48

¹⁹ *World Investment Report*, Unctad. 2003

²⁰ Hideo Ohashi, “China’s Regional Trade and Investment Profile”, dlm. David Shambaugh (ed.), *Power Shift* (2005), hal. 71

²¹ R. Nicholas Lardy, “China and the Asian Financial Contagion” pada *Asian Contagion: The Cause and Consequences of a Fianancial Crisis*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 1999), hal. 83

melakukan alih teknologi karena perusahaan-perusahaan asing tersebut selain membawa modal juga membawa teknologi yang dimilikinya ke Cina²². Selain itu kehadiran merek juga dimanfaatkan pula oleh pihak Cina untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan Cina terutama Perusahaan Milik Negara (PMN).

Sejak dimulainya reformasi pada tahun 1979, Pemerintah Cina telah bertekad untuk mereformasi PMN yang dimilikinya. Tahun 1979 dicatat sebagai tahun diumumkannya rencana pemerintah untuk mereformasi PMN. Di Cina, walaupun perekonomiannya terlihat seperti dijalankan dengan gaya kapitalisme, akan tetapi PMN dalam perekonomian negara Cina sangat penting. Ini sangatlah berbanding terbalik dengan teori ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa perekonomian negara harus memiliki kebebasan tanpa adanya intervensi dari negara (*Invisible Hand's Theory*)²³. Hal ini dipertegas pula pada pidato Jiang Zemin 江泽民 tahun 1997, di hadapan anggota partai pada Kongres XV Partai Komunis Cina yang menekankan pentingnya PMN pada perekonomian Cina, berikut penggalan pidato Jiang:

“Peran kepemimpinan dari sektor perusahaan milik negara harus tampak dalam kekuasaan kontrol. Kita harus membuat penyesuaian strategis pada ekonomi sektor perusahaan milik negara. Mereka harus menduduki posisi yang dominan dalam industri penting dan menentukan yang menyangkut hidup matinya ekonomi nasional.”²⁴

Pada pernyataan Jiang Zemin tersebut dapat dilihat bahwa para pemimpin Cina sangat menekankan pentingnya peranan PMN dalam mengembangkan perekonomian negara dan menginginkan PMN Cina sebagai ujung tombak dari upaya pengglobalisasian perekonomian Cina. Selain itu, para pemimpin Cina sepertinya

²²Perusahaan dari negara-negara maju yang berinvestasi di Cina secara otomatis menjadi perusahaan multinasional karena negara tersebut melaksanakan bisnisnya tidak hanya pada satu negara.

²³ *Invisible Hand's Theory* adalah teori dari Adam Smith yang merupakan tokoh ekonomi kapitalis klasik. Menurut Smith gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (*Modal-Commodity-Money*, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Lebih jelasnya lihat di <http://plus.maths.org/issue14/features/smith/>

²⁴ Wibowo, *Op.cit* hal 117.

sadar bahwa akan muncul masalah dalam perekonomian Cina jika PMN yang bermasalah terus dipertahankan, sehingga PMN yang bermasalah tersebut harus digabungkan (*merger*), bukan dilikuidasi. Hal ini diperkuat pula dengan adanya UUD 1982 yang telah diamandemen pada 1999 yang menyatakan bahwa perusahaan PMN merupakan “komponen penting” dari perekonomian Cina. Pada pidato hari kemerdekaan Cina Ke Limapuluh tanggal 1 Oktober 1999 pun, Jiang Zemin menegaskan pula bahwa:

“Aset publik akan mendominasi aset masyarakat; sektor yang dimiliki oleh negara mengendalikan jalur kehidupan ekonomi nasional dan memainkan peranan memimpin dalam pembangunan ekonomi.”²⁵

Bahkan pada Januari 2000, Wakil Perdana Menteri, Jian Qiangui dengan lebih jelas menyatakan bahwa bagi Cina mutlak untuk mengembangkan sejumlah perusahaan besar untuk dapat dijadikan tulang punggung ekonomi nasional dan kekuatan utama, agar dapat ikut serta dalam kompetisi internasional.²⁶ Para pemimpin Cina rupanya tidak ingin membuang aset yang dimilikinya begitu saja, terutama PMN yang masih menghasilkan keuntungan.²⁷ Walaupun hal ini sangat bertentangan dengan teori ekonomi neo-klasik²⁸, perusahaan milik negara tersebut dipertahankan dan dikembangkan sampai menjadi setara dengan konglomerat seperti *Chaebol* di Korea Selatan dan *Keikiritsu* di Jepang. Semua perusahaan PMN Cina diberi tugas untuk menjadi ujung tombak industrialisasi dan modernisasi Cina.²⁹

Setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan ekonomi yang fundamental, Cina pada akhirnya dikenal sebagai salah satu pusat produksi global (*Factory of the World*) dan penyuplai enam puluh enam produk-produk sepuluh

²⁵ Wibowo, *Supra*, hal 53-54.

²⁶ Wibowo, *Supra*, hal 117

²⁷ Peter Nolan, *China and the Global Economy: National Championships, Industrial Policy and The Big Business Revolution*, (New York: Palgrave, 2001), hal. 16.

²⁸ Model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh **Robert Merton Solow**, seorang ekonom Amerika Serikat. Model pertumbuhan ekonomi ini sering dikenal sebagai [model pertumbuhan neo-klasik](#), memungkinkan determinan pertumbuhan ekonomi untuk dipisahkan ke dalam masukan ([buruh](#) dan [model](#)) dan proses teknik. Menggunakan modelnya, Solow menghitung bahwa sekitar empat perlima pertumbuhan dalam output di AS per buruh diakibatkan oleh proses teknik. Lebih jelasnya lihat di <http://one.indoskripsi.com/node/7518> dan <http://sipoel.unimed.in/login/index.php>

²⁹ Wibowo, *Op.cit*, hal 118.

industri manufaktur terbesar di dunia pada tahun 2001.³⁰ Hal ini memungkinkan Cina untuk mengalirkan dananya keluar negeri untuk memacu pertumbuhan di dalam negerinya. Pada awalnya Cina tidak dikenal sebagai negara pengeksport investasi yang penting. Namun, menjelang akhir 2004, Cina sudah mendirikan 8.299 perusahaan di luar negeri dan memiliki angka kumulatif ODI (*Outward Direct Investment*) lebih dari US\$44,8 milyar di 150 negara. Menurut data statistik Kementerian Perdagangan Cina (*Ministry of Commerce/ MOFCOM*) pada tahun 2005, tercatat aliran kumulatif ODI sebesar US\$ 57,2 milyar, ini merupakan sepersepuluh dari semua aliran FDI dari negara berkembang.³¹

Pemerintah Cina pun antara tahun 1991-1997 membangun sebuah “Tim Nasional” yang berjumlah 120 perusahaan. “Tim Nasional” tersebut merupakan perusahaan-perusahaan besar milik negara yang nantinya akan berperan dalam arena persaingan industri di tingkat global. 120 perusahaan raksasa tersebut memiliki fungsi strategis masing-masing.³² Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor: pelistrikan, batu bara, otomotif, elektronika, besi dan baja, mesin, kimia, material untuk konstruksi, transportasi, ruang angkasa, obat-obatan.³³ Semua perusahaan-perusahaan ini mendapatkan berbagai macam fasilitas dan dukungan finansial dari negara. Tabel berikut merupakan tigapuluh besar perusahaan terbesar di Cina berdasarkan peringkatnya dalam jumlah ODI dan sepuluh besar perusahaan yang berprofit tinggi tahun 2005:

Tabel 1
30 Besar Perusahaan Terbesar berdasarkan ODI

No	2004	2005
1	China Mobile	China National Petroleum Corp.
2	China National Petroleum Corp.	China National Offshore Oil Corp.
3	China National Offshore Oil Corp.	China Mobile

³⁰ Hideo Ohashi, *Op.cit*, hal 71

³¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *World investment report 2006: FDI from developing and transition economies: Implication for development*, (New York: United Nations, 2006).

³² Nolan, *Op.cit*, hal. 18

³³ *Loc.Cit* lihat juga pada Wibowo, *Loc.Cit*, hal. 118

4	China Resources (Holding) Co. Ltd.	China Resources (Holding) Co. Ltd.
5	COSCO	COSCO
6	CITIC	SINOPEC
7	SINOPEC	CITIC
8	China Telecom	China Merchant Group
9	Guangdong and Hongkong Investment Holding	China National Cereal, Oil and Foodstuff
10	China Merchant Group	China Construction Corp.
11	China NetCom	China Aviation
12	China Construction Corp.	China Telecom
13	Lenovo Holding	SinoChem
14	China Aviation Group	China NetCom
15	China Power Investment Group	China Shipping
16	China Minmetals	Guangdong and Hongkong Investment
17	SinoChem	Shanghai Auto Group
18	China National Cereal, Oil and Foodstuff	Shum Yip Holding Company
19	China Shipping	Lenovo Holding
20	Sino Transportation Group	China Power Investment Group
21	Shanghai Auto Group	China Minmetals
22	China Huaneng Group	Sino Transportation Group
23	Beijing Orient Electrics Group	TCL
24	China World Best Group	Beijing Orient Electrics Group
25	TCL Group	China Huaneng Group
26	Guangdong Hangyun Group	China Poly
27	Shanghai Bao Steel	Shanghai Bao Steel
28	Beijing Jade Bird Group	China Shou Gang Group
29	China Nonferrous Metal Mining Group	China Nonferrous Metal Mining Group
30	China Road and Bridge Corp.	China North Industrial Group

Sumber Data: China FDI Statistics Report, Ministry of Commerce and China Statistics Bureau (2005-2006)

Tabel 2
Top 10 PMN Paling Menguntungkan (2005)

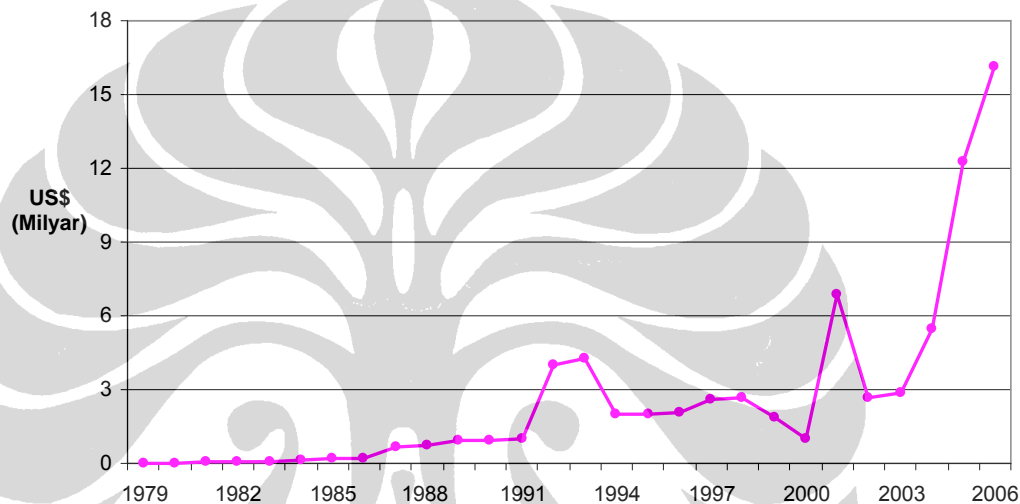
Peringkat	Nama Perusahaan	Pendapatan Bersih (¥ 100M)	Pertumbuhan Tahun Sebelumnya (%)
1	China National Petroleum Corp.	1,756.1	46.1
2	China Mobile	782.1	21.9
3	SINOPEC	551.8	27.6
4	China National Offshore Oil Corp.	357.9	55.2
5	China Telecom	338.6	3.8
6	Shen Hua Group Corp.	221.0	85.0
7	BaoSteel	220.5	0.5
8	COSCO	200.4	64.2
9	Aluminum Corp. of China Ltd.	150.2	51.3
10	State Grid Corporation of China	143.9	44.9
Total top 10		4,722.5	40.05
All 169 National SOEs		6,276.5	27.9
All 271,835 SOEs and non-state enterprises above designated size*		14,802.54	22.6

Sumber Data: State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, dan 中国统计年鉴 2006.

Pada tabel 1 terlihat bahwa perusahaan yang menjadi perusahaan terbesar dalam ODI didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi strategis yang telah dicanangkan pemerintah Cina dalam “Tim Nasional”. Bahkan lebih dari lima perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan masuk dalam kategori perusahaan terbesar berdasarkan nilai investasinya. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang mengejutkan mengingat Cina sendiri bukan merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Apalagi pada tabel 2 pun diperlihatkan pula bahwa terdapat tiga perusahaan energi yang masuk ke dalam kategori “Top 10” perusahaan yang paling menguntungkan pada tahun 2005, yaitu China National Petroleum Corp, SINOPEC, China National Offshore Oil Corp. Ketiga perusahaan energi ini sekarang telah menjadi perusahaan energi multinasional yang mampu

bersaing di pasar internasional dan memiliki ladang minyak di berbagai belahan dunia yang kaya akan sumber energi seperti Asia Tenggara, Timur –Tengah, dan Afrika.³⁴ Bahkan perusahaan-perusahaan energi Cina sekarang telah masuk juga ke dalam kategori “Top 10 Industrial Companies” di bursa saham Hong Kong (Hangseng).³⁵

Grafik 1
Investasi Cina Keluar Negeri (1979-2006)



Sumber: Ministry of Commerce and China Statistics Bureau

Ini ditunjukkan ODI Cina pada tahun 2005 mencapai US\$12,5 milyar dan diperkirakan mencapai 1,7% dari total persentase global. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yaitu tidak lebih dari 5%, bahkan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Singapura dan Rusia, namun bila kita merujuk pada tahun-tahun sebelumnya (Grafik 1), angka ini dapat dilihat sebagai sebuah kesuksesan Cina yang mengagumkan dalam menjalankan program keterbukaannya, karena pada tahun-tahun sebelum 1979, Cina merupakan sebuah negara tertutup yang memiliki angka perdagangan luar negeri relatif nol. Pada Grafik 1 ditunjukkan bahwa jumlah ODI Cina pada tahun 1979 sampai pada tahun 1986 hampir mendekati nol dan mulai

³⁴Perusahaan ini memiliki jumlah investasi yang cukup besar di kawasan tersebut, lihat di Economist (The), “Chinese firms abroad: Spreading their wings,” 6 September 2003, hal.57.

³⁵Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (<http://www.hkex.com.hk>)

mengalami kenaikan bertahap pada tahun 1987, sejalan dengan dijalankannya *Gaige Kaifang* di Cina. Pada Grafik 1 pun mulai terlihat peningkatan angka ODI yang tinggi pada tahun 2001, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2005. Pada grafik tersebut, dicatat bahwa tahun 2006 merupakan titik ODI tertinggi selama tiga dekade terakhir. Kecepatan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan ini yang memungkinkan Cina untuk memiliki ketertarikan pada investasi yang tepat pada sasarannya. Ini merupakan strategi Cina untuk mencari kesempatan dan pasar di luar negeri. Berikut merupakan tabel perbandingan investasi Cina keluar negeri dengan beberapa negara di dunia:

Tabel 3
Perbandingan Investasi Keluar Negeri Beberapa Negara

(US\$ Milyar)	Aliran ODI pertahun			Kumulatif ODI		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Aliran ODI Global	612.2	730.3	—	8,196.9	9,732.2	—
ODI Cina						
Total	2.9	5.5	12.3	33.2	44.8	57.2
Total Persentase Global	0.5%	0.8%	1.7%	0.4%	0.5%	0.6%
Negara-negara Maju						
Jepang	—	—	31.0	—	335.5	370.5
Perancis	—	—	47.8	—	—	—
Kanada	—	—	47.5	—	307.8	369.8
Belanda	—	—	14.6	—	—	—
Italia	—	—	19.3	—	238.9	280.5
Inggris (UK)	—	—	65.4	—	1,128.6	1,378.1
Spanyol	—	—	54.3	—	207.5	332.6
USA	—	—	229.3	—	2,069.0	2,018.2
Negara-negara Berkembang						
Chile	—	1.4	—	—	—	—
Brazil	—	—	9.5	—	54.6	64.4

Meksico	—	1.4	2.2	—	13.8	15.9
Korea Selatan	—	3.4	4.8	—	34.5	39.3
Malaysia	—	1.4	2.1	—	29.7	13.8
Singapura	—	5.5	10.7	—	90.9	100.9
Rusia	—	5.1	9.6	—	51.8	81.9

Sumber: World Investment Report (2004) and World Investment Report (2005) of UNCTAD, and China Ministry of Commerce

Setelah terjadinya reformasi di berbagai bidang untuk mendukung program keterbukaannya dan menjadikannya sebagai negara penerima investasi asing (*host country*) terbesar di dunia, Cina pada akhirnya menjadi salah satu negara penginvestasi yang cukup disegani, sesuai dengan tabel 3 yang menunjukkan angka kumulatif ODI Cina pada tahun 2005 telah mencapai 0,6% dari total kumulatif ODI yang ada di dunia, dan memiliki aliran dana ODI sebesar 1,7%. Angka ini merupakan angka yang cukup besar untuk negara berkembang seperti Cina yang baru beberapa dekade mereformasi perekonomiannya. Hal ini diperkuat pula dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun jumlah investasi yang dimilikinya di berbagai negara di belahan dunia ini. Selain itu, dengan masuknya Cina sebagai anggota WTO dan adanya peningkatan kerjasama di berbagai organisasi regional di berbagai kawasan, memudahkan Cina untuk mengakses pasar lokal dan mempermudah akses Cina dalam menanamkan modalnya di berbagai negara. Pada tahap selanjutnya, ODI Cina pun akan memiliki banyak keleluasaan untuk tumbuh bebas dengan jumlah yang mengagumkan.³⁶

II.2. Investasi Langsung di Luar Negeri (*Outward Direct Investment/ ODI*)

ODI (*Outward Direct Investment/ Investasi Langsung di Luar Negeri*) adalah suatu investasi aset domestik ke luar negeri. Aset yang dimaksud yaitu berupa perlengkapan, struktur, dan organisasi, bukan berupa saham suatu perusahaan. Cara yang paling umum dilakukan oleh suatu perusahaan untuk berinvestasi antara lain

³⁶ Randall Morck dan Minyuan Zhao, *Perspectives on China's Outward Foreign Direct Investment*, (New York University: 2007), hal. 2-3

adalah M&A (merger dan akuisi/ *merger and acquisitions*). M&A adalah suatu cara berinvestasi yang dilakukan dengan cara membeli atau menggabungkan (*merger*) dengan perusahaan di luar negeri³⁷. Bentuk lain dari ODI adalah *Greenfield*, yang berarti mendirikan pabrik baru di negara lain. Dengan kata lain, suatu perusahaan melakukan investasi dari nol dengan mendirikan sebuah pabrik baru.

Tabel berikut menunjukkan beberapa perusahaan Cina yang sedang dalam proses mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing.

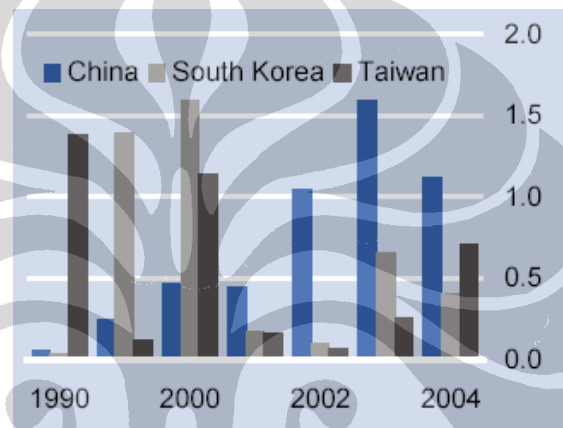
Tabel 4
Daftar Akuisisi Utama Perusahaan Cina
(Periode Jan 1999-Jan 2006)

Announcement date	Deal status	Acquired stake	Bid value EUR m	Target name	Target domicile	Chinese bidder
May 2005	Aborted	n.a. (100%)	15,255	Unocal	USA	CNOOC
Aug 2005	Completed	100%	3,204	PetroKazakhstan	Canada	PetroChina
Jan 2006	Pending	45%	1,894	Akpo oil field assets	Nigeria	CNOOC
Dec 2004	Completed	100%	1,303	IBM (Personal Computer Business)	USA	Lenovo
Jun 2001	Completed	100%	1,154	Hyundai Display Technology	South Korea	BOE Technology
Jun 2005	Aborted	n.a. (100%)	1,050	Maytag	USA	Hai'er
Jan 2002	Completed	86%	672	Repsol-YPF (Indonesian assets)	Indonesia	CNOOC
Oct 2003	Pending	13%	593	Gorgon Liquefied Natural Gas Field	Australia	CNOOC
Nov 2003	Completed	67%	450	Thomson SA (television manuf. unit)	France	TCL
Jul 2004	Completed	49%	419	Ssangyong Motor	South Korea	Nanjing Auto
Jun 2005	Pending	100%	370	PetroChina International	Indonesia	CNPC, PetroChina
Jul 2005	Completed	100%	72	MG Rover	UK	Nanjing Auto

(<http://organisasi.org/macam-jenis-serta-pengertian-ekspansi-bisnis-merger-akuisisi-hostile-take-over-dan-leverage-buyout>)

Sumber: Deutsche Bank Research

Grafik 2
Perbandingan M&A antara Cina, Korea Selatan dan Taiwan
(Dalam Milyar Dolar AS)



Sumber: World Investment Report 2005

Dilihat dari kedua data (Tabel 4 dan Grafik 2) di atas dapat terlihat bahwa Cina berusaha untuk mengukuhkan daya saingnya pada perekonomian dunia. Terlebih setelah berhasilnya menerapkan kebijakan *Gaige Kaifang* di awal tahun 1980-an, Cina semakin menekankan kebijakannya untuk mengucurkan dananya keluar negeri. Ini dilakukan agar perekonomian negaranya tidak mandek dan jalan di tempat. Hal ini terlihat pula pada Grafik 2 yang menunjukkan bahwa M&A Cina pada awal 1990-an tidak begitu besar, namun meningkat setelah tahun 2002 dan meningkat tajam pada tahun 2003. Pada dasarnya tujuan utama ODI adalah untuk membangun pasar luar negeri, mengamankan keberadaan SDA (Sumber Daya Alam), dan menghindari friksi perdagangan. Namun, dalam kasus ODI Cina, terdapat beberapa tujuan yang dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Mengakses energi dan bahan mentah
2. Memperoleh teknologi, merek dagang, dan keterampilan

3. Mengindari hiper-kompetisi di pasar domestik

Untuk lebih jelasnya, hal tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikut:

II. 2.1. Mengakses energi dan bahan mentah

Kebutuhan manusia akan sumber daya alam semakin besar, begitu pula dengan pemakaiannya. Di era sekarang ini, salah satu sumber daya alam yang paling penting dan paling diminati di dunia adalah minyak. Kebutuhan akan minyak di seluruh dunia pada tahun 2004 mencapai lebih dari 80 juta barel³⁸ dan akan meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini juga berlaku bagi Cina yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, dengan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) rata-rata sebesar 9,8% per tahun sejak periode 1985-1995, mengakibatkan peningkatan konsumsi energinya, sehingga Cina membutuhkan sebuah kebijakan untuk selalu mencari sumber energinya di luar negeri. Keadaan peningkatan kebutuhan akan energi tersebut, umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang perindustriannya masih sangat mengandalkan pada konsumsi energi, sehingga dengan adanya pertumbuhan PDB tersebut, maka menyebabkan pula pada peningkatan konsumsi dan kebutuhan pada minyak baik untuk masyarakat secara umum maupun pada kegiatan industri. Hal tersebut juga berlaku bagi Cina yang masih merupakan negara berkembang.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonominya, Cina juga membutuhkan beragam bahan mentah lainnya, seperti aluminium, tembaga, nikel, biji besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Hal ini di dukung pula dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam perusahaan-perusahaan pertambangan Cina yang notabene merupakan perusahaan milik negara dengan cara menyuntikkan dana dan mengakuisisi perusahaan tersebut, serta menggabungkan (*merger*) perusahaan-perusahaan tersebut ke perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada diluar negeri, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2005 PetroChina mengakuisisi perusahaan minyak Kanada yang

³⁸ Paul Roberts, *The End of Oil: On The Edge of Perilous World*, (New York: Houghton Mifflin Company, 2004), hal. 7.

beroperasi di Kazakhstan, yaitu PetroKazakhstan. Dalam kasus ini terlihat bahwa PetroChina mengakuisisi PetroKazakhstan sebesar 3,204 milyar Euro. Bahkan, bukan hanya Kazakhstan yang menjadi incaran Cina dalam memperoleh sumber energinya, Indonesia pun tidak luput menjadi perhatian Cina dalam upayanya mencari sumber daya alam, pada Tabel 4 diperlihatkan pula bahwa pada bulan Januari 2002 CNOOC mengakuisisi perusahaan minyak milik Spanyol yang beroperasi di Indonesia, yaitu Repsol-YPF dengan total 672 juta Euro. Ini merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah Cina dalam mengamankan sumber energinya mengingat Kazakhstan dan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber minyak dan bahan mentah lainnya.

Untuk dapat mencapai dan memuluskan tujuannya, pemerintah Cina seringkali menggunakan jalur diplomasi antara lain dengan cara penguatan hubungan perdagangan bilateral, memberikan hibah, dan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan seperti transportasi dan komunikasi. Dalam hal ini, para ahli menyatakan bahwa hibah yang dikucurkan Cina ke negara-negara tujuan investasi Cina sebagai “*Dollar Diplomacy*”, seperti yang dilakukan Cina kepada Bolivia dengan menawarkan investasi sebesar US\$100 milyar ketika Presiden Hu Jintao berkunjung ke negara Amerika Latin tersebut untuk memuluskan akses Cina pada tambang emas Bolivia. “*Dollar Diplomacy*” ini sering dilakukan pemerintah Cina untuk mendukung pembangunan Cina yang membutuhkan sangat banyak sumber daya alam.

II. 2. 2. Memperoleh teknologi, merek dagang, dan keterampilan

Teknologi, merek dagang, keterampilan manajerial, dan jaringan distribusi merupakan sesuatu yang penting dalam ekonomi untuk mengembangkan pasar, terutama pasar di luar negeri. Untuk itu, perusahaan-perusahaan Cina yang selama ini dikenal oleh masyarakat internasional memiliki kualitas produk rendah, membutuhkan merek dagang yang cukup terkenal di kalangan masyarakat internasional dan keterampilan manajerial yang berpengalaman, sehingga dapat menghasikan sebuah produk yang berkualitas tinggi dan mengembangkan

perusahaan-perusahaannya menjadi perusahaan multinasional yang dapat berkompetisi dengan baik di pasar global.

Dalam kasus ini, dapat diambil contoh pada kasus perusahaan komputer asal Cina yaitu Lenovo yang mengakuisisi divisi perusahaan komputer pribadi (*Personal Computer/ PC*) asal Amerika Serikat yang cukup berpengalaman dan ternama, yaitu IBM sebesar 1,303 milyar Euro (Lihat Tabel 4). Akuisisi perusahaan tersebut merupakan langkah Cina dalam mengembangkan perusahaan-perusahaannya menjadi perusahaan yang berkelas internasional. Selain itu, ini juga merupakan sebuah langkah besar bagi Cina untuk dapat mengakses teknologi dan keterampilan yang telah dimiliki oleh IBM sendiri, sehingga Lenovo pun dapat menciptakan sebuah inovasi teknologi yang memiliki kualitas setara yang dapat bersaing dengan kualitas PC merek dagang lainnya. Dengan kata lain, akuisisi divisi PC IBM tersebut merupakan sebuah wujud dari keberhasilan Cina dalam menembus pasar dunia dan memperoleh teknologi, keterampilan, serta merek dagang.

Adanya akuisisi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, menjadi sebuah ikon kebanggaan bagi Cina, karena sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki peraturan investasi yang sangat ketat, terlebih lagi perusahaan tersebut berasal dari Cina yang notabene merupakan salah satu dari “Tim Nasional” bentukan dari pemerintah Cina. Adanya keberhasilan pada akuisisi divisi perusahaan tersebut menyebabkan munculnya percaya diri dikalangan pebisnis Cina, bahwa mereka juga mampu mengelola perusahaan-perusahaan mereka. Selain itu, akuisisi tersebut dilakukan bukan hanya untuk memperoleh teknologi, merek dagang, dan keterampilan semata, melainkan juga dikarenakan adanya peningkatan kesadaran untuk meningkatkan daya saing mereka pada kompetisi global, terutama setelah bergabungnya Cina ke dalam keanggotaan WTO pada tahun 2001.

II. 2. 3. Menghindari hiper-kompetisi di pasar domestik

Adanya kompetisi perdagangan yang berlebih, penipisan kesempatan, dan overkapasitas pada banyak industri menyebabkan hiper-kompetisi di pasar dalam

negeri Cina, sehingga Cina menghimbau perusahaannya berinvestasi di luar negeri untuk menciptakan sebuah perusahaan berbasis luar negeri (multinasional). Hal ini dilakukan untuk dapat mempermudah akses pasar lokal dan efisiensi ongkos produksi. Ini lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan di dunia untuk mendapatkan bahan mentah dan konsumen.

Pada kasus Cina, sektor peralatan rumah tangga merupakan pasar yang berpotensi hiper-kompetisi, karena menurut analisis yang dilakukan oleh McKinsey and Co., dewasa ini Cina diperkirakan overkapasitas mesin cuci, kulkas, dan oven microwave sebesar 30%-40% dan mendekati 90% untuk televisi. Salah satu contoh pada kasus ini, yaitu kasus sebuah perusahaan manufaktur Cina yang memiliki pusat distribusi di Amerika Serikat, yaitu Hai'er dalam mengakuisisi perusahaan sejenis. Hai'er merupakan perusahaan Cina yang mengakuisisi Padova yang merupakan perusahaan yang berbasis di Italia untuk produksi 'white goods' lokal³⁹. Tujuan dari akuisisi ini, yaitu mempermudah Hai'er untuk dapat mengakses berbagai jenis 'white goods' yang telah berteknologi tinggi, pasar Uni-Eropa yang mempunyai standar tinggi, dan kucuran dana dari bank-bank lokal. Hal ini dilakukannya karena dengan adanya akuisisi pada perusahaan lokal, maka perusahaan tersebut walaupun merupakan kepemilikan asing, namun masih tetap terdata sebagai perusahaan lokal. Pada konteks ini, Hai'er memiliki hak istimewa untuk mengakses keuangan dari bank-bank lokal, untuk membantu memfasilitasi ekspansinya ke luar negeri dan memperoleh pasar dalam negeri. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mempermudah perusahaan-perusahaan Cina untuk mengembangkan pasarnya di luar negeri yang telah dilindungi oleh asosiasi-asosiasi kerjasama regional, seperti NAFTA (*North America Free Trade Area*), Uni Eropa, dan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

³⁹ Menurut BussinessDictionary.com *White goods* adalah peralatan rumah tangga yang dapat dipakai dalam waktu lama dan dicat halus dengan warna putih, walaupun dewasa ini barang-barang ini memiliki berbagai macam warna, namun barang-barang ini tetap disebut sebagai 'white goods', yang termasuk dalam white goods adalah kulkas, AC, kompor, mesin cuci, mesin pencuci piring, dll. Akan tetapi berbeda dengan 'brown goods' yang merupakan peralatan rumah tangga yang dapat digunakan dalam waktu singkat, seperti TV, radio, CD/DVD player, dan komputer.

II.3. Evolusi ODI Cina

Selama dua puluh tahun lebih Cina telah menjadi negara penerima FDI dengan jumlah terbesar di dunia, namun hal ini berbanding terbalik dengan arus ODI yang baru mulai meningkat pada awal tahun 2000-an, tepatnya pada saat pemerintah Cina mulai melakukan pelonggaran terhadap pembatasan kurs asing⁴⁰ dan melihat kembali pada investasi luar negeri yang menjanjikan, juga ketika pemerintah menyusun anggaran negara untuk mendukung perusahaan melakukan investasi ke luar negeri.

Istilah ‘going global’ tercetus pada tahun 2001 oleh PM Cina Zhu Rongji berkaitan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang ke-10 oleh pemerintah Cina⁴¹. Sebelumnya, pada tahun 1998 Presiden Jiang Zemin telah mengeluarkan kebijakan ini untuk memajukan pengembangan sumber daya alam Cina ke luar negeri. Istilah ‘go global’ atau ‘go abroad’ (走出去 *zou chuqu*) ini bermakna mendorong perusahaan-perusahaan di Cina (perusahaan lokal) untuk melakukan investasi ke luar negeri.

Berikut adalah beberapa orientasi yang didorong pemerintah Cina dalam mengembangkan kebijakan ‘go abroad’ ODI ini.

- Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di luar negeri
Pemerintah Cina mendorong dan mendukung perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan bahan baku di luar negeri.
- Investasi ke luar negeri oleh industri yang relatif besar
Pemerintah Cina mendorong pembangunan basis manufaktur dan jaringan pemasaran di negara-negara tujuan investasi.
- Industri pelayanan ‘go abroad’

⁴⁰ Sebelumnya di Cina penggunaan kurs asing dibatasi hanya pada beberapa kelompok tertentu dan pemerintah saja.

⁴¹ Lunding Andreas, *Op.cit*, hal. 5

Pemerintah Cina mendorong perusahaan dalam negeri untuk ikut serta dalam industri pelayanan di negara lain, seperti perdagangan, perbankan, asuransi, pelayanan telekomunikasi, dan logistik.

- Akuisisi teknologi, pengalaman manajerial, dan kemampuan tenaga kerja. Pemerintah mendorong perusahaan untuk membangun pusat R&D (*research and development*) di negara berkembang yang memiliki sumber daya berlebih, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berinovasi.

Tidaklah mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ‘go global’ ini. Di bawah ini akan dibagi beberapa fase langkah utama pemerintah Cina dalam mencanangkan strategi tersebut⁴².

- Fase 1 (1979-1983) Persetujuan kasus per kasus (*case by case*)
- Fase 2 (1984-1992) Menuju persetujuan standarisasi prosedur, yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan ruang lingkup kekuasaan dalam memeriksa dan menyetujui pembangunan perusahaan *nontrading* di luar negeri, termasuk juga di Hong Kong dan Macao.
- Fase 3 (1993-1998) Memperketat pengaturan investasi ke luar negeri, yaitu dengan mengatur administrasi perusahaan di luar negeri. Juga dengan mengukur administrasi perusahaan *trading* di luar negeri beserta kantor perwakilannya.
- Fase 4 (1999-2002) Mendorong proyek ke luar negeri dalam proses perdagangan.
- Fase 5 (2002-2005) Perwujudan strategi ‘Go Global’

Selain itu, Perkembangan ODI Cina sangat ditunjang oleh perubahan pandangan ideologis Cina yang mengarah pada perusahaan multinasional dan

⁴² Bellabona Paola. *The Go Global Policy*. 2008. www.chinainsightstoday.com. (diakses pada 13 Mei 2008), hal. 136.

kebijakan bagi pelaksanaan perusahaan-perusahaan transnasional Cina, sehingga memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan Cina untuk mengembangkan ekspansinya keluar negeri. Pada bagian ini akan dibahas mengenai evolusi ideologis dan kondisi kebijakan yang menyebabkan pertumbuhan dramatis ODI Cina. Beberapa evolusi ini akan dipisahkan ke dalam tiga tahap sebagai berikut:⁴³

1. Periode 1978-1991: Munculnya ODI
2. Periode 1992-2000: Munculnya dukungan politik
3. Periode 2001-2007: Antusiasme

Untuk lebih jelasnya, hal tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikut:

II. 3. 1. Periode 1978-1991: Munculnya ODI

Sebelum 1978, pandangan ideologis Cina dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan alat imperialis untuk mengeksploitasi perekonomian dan juga merupakan wujud dari neo-kolonialisme yang dianggap sebagai bentuk dari perekonomian internasional yang tak dapat dibenarkan⁴⁴. Dorongan kebijakan ODI dimulai pada tahun 1985 ketika Kementerian Hubungan Perekonomian Asing dan Perdagangan (*Ministry of Foreign Economic Relations dan Trade/ MOFERT*) mengeluarkan *Provisions Governing Control and Approval Procedures for Opening Non-Trade Enterprises Overseas*, yaitu dokumen pertama pemerintah pusat yang mengatur pelaksanaan investasi Cina di luar negeri. Ketentuan ini untuk pertama kalinya dengan jelas ditetapkan bahwa semua entitas ekonomi (hanya ditujukan kepada perusahaan perdagangan dan jumlah terbatas perusahaan yang telah ditunjuk) dapat menanamkan modalnya dan mendirikan usahanya di luar negeri. Di samping itu, ketentuan ini secara jelas menetapkan syarat untuk perizinan dan untuk memotivasi investasi keluar Cina. Ada pun syarat-syarat tersebut antara lain adalah⁴⁵:

- Untuk mengimpor teknologi dan peralatan maju yang sulit untuk diimpor melalui jalur lain (teknologi perolehan FDI).

⁴³ Shaoming Chen dan Roger R. Stough, *The Pattern and Magnitude China's Outward FDI in Asia*, (Indian Council for Research on International Economic Relation, 2007), hal. 2-5.

⁴⁴ Chen dan Stough, *Op. cit*, hal. 3.

⁴⁵ *Loc. cit*

- Untuk menyediakan persediaan bahan mentah yang diperlukan dalam mengembangkan perekonomian dalam negeri Cina yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.
- Untuk menghasilkan pendapatan mata uang asing untuk Cina.
- Untuk menghasilkan ekspor mesin dan peralatan Cina, serta memperluas keahlian teknologi dan jasa pekerja di luar negeri (memperluas pasar).
- Untuk menyediakan pasar domestik Cina dan menghasilkan devisa.

Syarat atau dasar rasional ini secara gamblang diarahkan kepada empat macam ODI dan tiga diantaranya, yaitu teknologi, sumber penghasilan, dan mencari pasar ODI.

Peran positif ODI Cina juga diperkuat oleh strategi pengembangan orientasi ekspor daerah pantai. Hal ini ditunjukkan dengan pembukaan 14 kota pantai pada tahun 1988, yang sebelumnya telah dibuka empat zona ekonomi istimewa (*Special Economic Zones/SEZ*) untuk turut serta pada program peningkatan perekonomian negara agar dapat bersaing dalam perekonomian internasional. Oleh sebab itu, untuk mendukung rencana pemerintah tersebut, maka dibutuhkan internasionalisasi pengelolaan (*guojihua jingying* 国际化经营) perusahaan Cina. Internasionalisasi perusahaan ini diperlukan untuk dapat mengambil keuntungan dari kerjasama dan pembagian kerja internasional untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di daerah pantai Cina. Akibatnya, pelaksanaan internasionalisasi perusahaan Cina yang dimiliki oleh negara untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam agenda pembaruan perekonomian Cina. Namun, pada periode ini hanya perusahaan perdagangan luar negeri milik negara (di bawah MOFERT) yang sah untuk menanamkan modal di luar negeri⁴⁶ dan aktivitas investasi mereka di luar negeri berhubungan erat dengan

⁴⁶ C. Tseng, "Foreign direct investment from the People's Republic of China. In H. de Bettignies (Ed.)" dalam *Business Transformation in China*, (London: International Thomson Business Press, 1996) hal. 121-128 lihat juga K. G. Cai, "Outward foreign direct investment: A novel dimension of China's integration into the regional and global economy" dalam *China Quarterly*, 160, (1999), hal 856-880.

pertimbangan politik pemerintah Cina untuk meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi serta untuk memperluas hubungan perdagangan internasional.⁴⁷

Singkatnya, tarik-menarik yang terjadi pada periode ini dipusatkan pada kesesuaian antara keberadaan perusahaan multinasional di Cina dengan doktrin sosialis yang menjadi landasan bagi negara Cina, serta penyesuaian antara pelaksanaan perusahaan Cina dengan prosedur internasional dan asas strategi perkembangan nasional.

II. 3. 2. Periode 1992-2000: Munculnya Dukungan Politik

Deng Xiaoping melakukan perjalanan tur ke provinsi-provinsi dan kota-kota di selatan Cina pada tahun 1992 merupakan langkah awal dukungan dan dorongan gigih ODI Cina. Perjalanan Deng ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali keterpusatan pengaturan ekonomi negara yang diorientasikan pada ekspor dengan berujung tombak pada penanaman investasi (FDI) di daerah pantai untuk pengembangan strategi dalam perbaikan ekonomi di seluruh Cina. Pada bulan September 1992, Kongres Nasional Keempatbelas Partai Komunis Cina, Jiang Zemin menyebutkan dan menegaskan bahwa “Kita sebaiknya menganjurkan perusahaan untuk memperluas investasi mereka di luar negeri dan melaksanakan transnasional.”⁴⁸

Sejak itu, pelaksanaan transnasional perusahaan Cina secara resmi sudah dimasukkan ke dalam strategi perkembangan nasional Cina dan secara eksplicit dianggap sebagai salah satu arah penintegrasian perekonomian Cina ke dalam perekonomian global. Selain itu, persiapan Cina untuk bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) yang selanjutnya meliberalisasi perdagangan, investasi, dan finansial Cina, yang pada tahapan selanjutnya mempercepat pelaksanaan transnasional perusahaan Cina. Dukungan di tingkat nasional untuk melaksanakan investasi keluar (ODI) dicerminkan pada tingkat provinsi dan kota. Dukungan dan dorongan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi (*Ministry of Foreign Trade and*

⁴⁷ H. Wu and C. Chen, “An assessment of outward foreign direct investment from China’s transnational economy” dalam *Europe-Asia Studies*, 53(8), (2001), hal 1235-1254.

⁴⁸ Beijing Review, 1992, hal. 20

Economic Cooperation/ MOFTEC) ini disertai pula dengan adanya dukungan Komisi Perekonomian dan Perdagangan Asing provinsi dan kota.

Periode ini terlihat sebuah gelombang raksasa pada perusahaan lokal dan daerah untuk menanamkan modalnya di luar negeri, hal ini tentu saja berkaitan erat dengan syarat lunak pada spekulasi properti dan saham yang diolah dengan baik, terutama di Hong Kong. Selama krisis keuangan Asia pada 1997 di antara cabang dan perusahaan mereka di luar negeri, banyak terjadi korupsi dan nepotisme yang merajalela dan banyak perusahaan merugi, sehingga sebagai konsekuensinya, pemerintah Cina (MOFTEC) memperketat perizinan dan prosedur untuk investasi keluar negeri (ODI). Pengetatan ini berakibat pada penurunan investasi keluar negeri secara drastis pada akhir 1990.

II. 3. 3. Periode 2001-2007 : Antusiasme

Meskipun adanya penyesuaian dan perketatan sementara perizinan investasi keluar negeri (ODI), dengan diterimanya Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001 meningkatkan antusiasme yang tinggi antara pemerintah dan perusahaan Cina untuk menanamkan modalnya ke luar negeri. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Zhu Rongji mengumumkan strategi “*going abroad*” (*zou chuqu*) pada perencanaan lima tahun kesepuluh Cina (2001-2005). Di sini dijanjikan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dan mengkoordinasikan jadwal bagi perusahaan Cina untuk berinvestasi keluar Cina. Strategi “*going abroad*” sebenarnya telah dicanangkan sejak akhir tahun 1980, akan tetapi secara formal diadopsi pada tahun 2001, dan telah menjadi bagian utuh pada keseluruhan strategi perkembangan ekonomi Cina. Strategi ini adalah strategi yang dimaksudkan untuk memberikan izin dan mempromosikan perusahaan Cina untuk berinvestasi secara global, secara aktif dilibatkan di persaingan internasional, dan oleh karena itu meningkatkan daya saing internasional mereka. Kementerian Perdagangan (MOFCOM) (pengganti MOFTEC) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi strategi ini. Fokus strategi ini, FDI telah didorong secara besar-besaran dengan setahap demi setahap dikendurkannya kontrol dan kuota kurs mata uang asing, menambah insentif investasi, serta memperkuat

fasilitas ODI dan mekanisme perlindungan yang diakibatkan dari perbaruan persetujuan bilateral, multilateral, dan inisiatif investasi dan perdagangan internasional. Strategi “going abroad” adalah langkah penting untuk memperdalam keterbukaan dan reformasi ekonomi Cina ke dunia luar. Dari prasangka politik pada perusahaan multinasional Cina pada tahun 1979, sampai pada penerimaan secara politik pada tahun 1992, dan sampai pada antusiasme politik pada tahun 2001, investasi Cina keluar (ODI) sepenuhnya sudah dianggap sebagai bagian integral perbaikan ekonomi Cina dan sebagai jawaban yang sangat kuat atas persaingan internasional dan integrasi global yang semakin meningkat.

II. 4. Efektivitas ODI bagi Pertumbuhan Ekonomi Makro⁴⁹ Cina

Untuk mendukung tujuan ODI-nya, ada beberapa hal ditekankan Cina. Pertama, Cina meningkatkan restrukturisasi industri domestik melalui ODI. Sejak

⁴⁹ Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (*household*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti [pertumbuhan ekonomi](#), [stabilitas harga](#), [tenaga kerja](#) dan pencapaian [keseimbangan neraca](#) yang berkesinambungan. Ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama yaitu: Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut *full employment*. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan *under employment* atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh; Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi; Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat *trade off* maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk. Untuk lebih jelasnya baca di http://tedi.heriyanto.net/papers/te_makro.html

tahun 1990-an, pemerintah Cina telah berusaha mengatur kapasitas penawaran yang terlalu tinggi yang muncul dari *overinvestment* dalam fasilitas produksi pada enam bulan pertama tahun 1990-an. Terlebih lagi sejak krisis ekonomi, ODI telah bermain dengan cara yang efektif untuk mengatur struktur industri dan kenaikan ekspor saat Cina berhadapan dengan ekonomi domestik yang stagnan.

Pada Februari 1998, Jiang Zemin mengemukakan strategi *go abroad* (走出去 *zou chuqu*) untuk memajukan restrukturisasi industri domestik dan memajukan pengembangan SDA ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah Cina merevisi hukum terkait dan menyederhanakan prosedur untuk mendorong investasi atau dikenal dengan 带料加工 *dailiao jiagong*, yaitu suatu proses investasi ke luar negeri dengan bahan-bahan yang diimpor dari Cina. Hasil dari proses ini adalah pabrik-pabrik besar seperti Konka, Changhong, Huawei, dan TCL yang telah beroperasi di negara-negara ASEAN untuk memproduksi televisi, yaitu produk yang telah *overstocked* (kuantitasnya berlebih) di Cina. ASEAN dipilih Cina karena selain secara geografis berdekatan dengan Cina, ASEAN juga memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi produk Cina dan kawasan ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup banyak untuk memberi pasokan memadai bagi kebutuhan industri Cina. Selain itu, di pasar dalam negeri ASEAN, Cina masih belum memiliki saingan yang cukup berarti dari produsen lokal dan Cina dewasa ini telah menjalin hubungan erat dengan negara-negara ASEAN yang tertuang pada penandatanganan Kerangka Kesepakatan atas Kerjasama Ekonomi ASEAN-Cina pada tahun 2002, yang kemudian akan diperkuat lagi pada Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Cina (ACFTA -- *ASEAN-China Free Trade Agreement*) yang akan dirampungkan pada tahun 2012 mendatang. Terlebih lagi Cina juga merupakan salah satu negara anggota ASEAN+3, yang secara politis menguatkan dan mempermudah Cina untuk mengalirkan dananya ke negara-negara ASEAN.

Kedua, menekankan upaya untuk memperoleh teknologi produksi, merk terkenal, dan toko penjualan di Amerika Serikat dan Uni Eropa.⁵⁰ Beberapa industri elektronik dan produk elektronik papan atas di Cina, seperti Haier, telah membangun beberapa pusat R&D (*Research and Development*). Sedangkan perusahaan lainnya pun dengan sukses telah mencapai tiga tujuan tersebut melalui M&A (*Merger and Acquisitions*). Salah satu contohnya adalah Wanxiang Corporation yang menjadi pemegang saham terbesar UAI, sebuah industri besar auto-parts di Amerika Serikat. Juga perusahaan Huali yang membeli sektor telekomunikasi seluler dari Philips Electronics. Ini merupakan sebuah tujuan yang beralasan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya akuisisi dan *merger* ke perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju seperti negara-negara di Amerika Utara dan Uni Eropa, maka memudahkan Cina untuk mendapatkan teknologi, merek dagang, dan keterampilan manajerial yang masih belum dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Cina, serta memudahkan para pengusaha atau pemilik pabrik di Cina untuk memperoleh teknologi tinggi yang telah dimiliki perusahaan yang diakuisisi tersebut. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Cina dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan papan atas dunia. Di kalangan pengamat ekonomi sendiri, sebenarnya telah banyak diskusi mengenai fenomena yang terjadi pada perusahaan-perusahaan Cina dewasa ini. Menurut para ahli, dengan memiliki cadangan devisa triliunan dolar dan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka Cina dapat dengan mudah memiliki kemampuan untuk mengirimkan perusahaan-perusahaannya ke luar negeri untuk memperoleh teknologi, merek dagang, sumber daya, dan akses terbaik ke pasar internasional.⁵¹ Berdasarkan data Departemen Perdagangan (*Ministry of Commerce- MOFCOM*), ODI Cina meliputi 6960 proyek dan nilai kontraknya mencapai US\$13.8 milyar pada akhir 2002. Pada pertengahan tahun 2003, 219 perusahaan berinvestasi keluar, jumlah tersebut meningkat 48% lebih pada periode yang sama di tahun lalu.⁵² Dibandingkan dengan jumlah investasi dalam negeri yang

⁵⁰ Ohashi, *Op.cit*, hal. 89.

⁵¹ Morck dan Zhao, *Op. cit*, hal 1

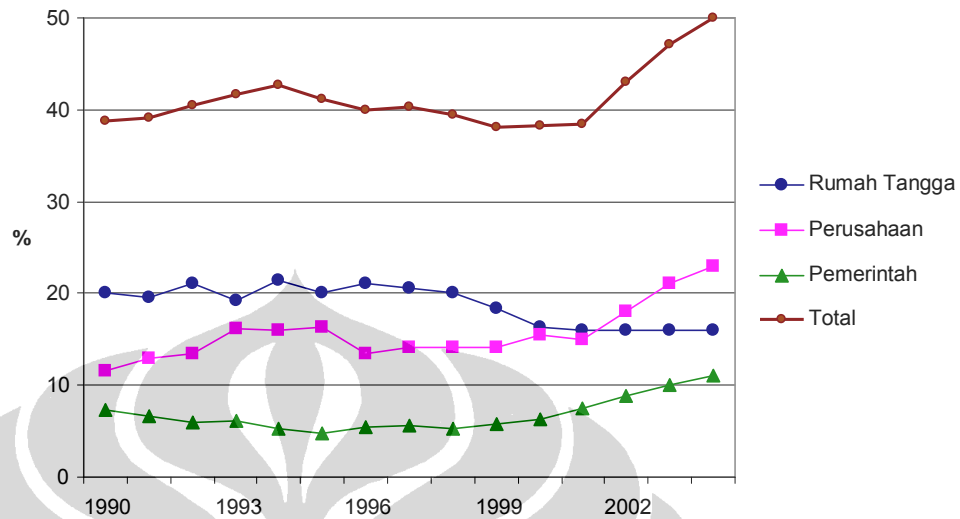
⁵² Ohashi, *Op.cit*, hal. 87

besar, *China's Outward Investment* (COI) masih dalam skala terbatas meskipun jumlahnya meningkat dengan cepat.

Sebenarnya, jumlah ODI tersebut bisa lebih besar daripada yang dinyatakan oleh MOFCOM. Pertama, Cina merupakan salah satu investor terbesar di dunia. Kedua, statistik neraca pembayaran menunjukkan bahwa ODI Cina mencapai rata-rata pertahun sedikitnya US\$ 2 milyar pada 1985-2002. Ketiga, dari sudut pandang ekonomi makro, keuntungan (*surplus*) yang didapat Cina sejak awal tahun 1990-an itu ditabung⁵³. Lalu sebagian tabungan tersebut digunakan untuk sektor asing. Tabungan domestik Cina sebagian besar mengalir ke bank yang dikuasai oleh negara dalam bentuk deposito. Pada Grafik 3 menunjukkan bahwa angka tabungan di Cina dari tahun ke tahun meningkat dan tabungan ini digunakan untuk membayar investasi. Pada Grafik ini ditunjukkan bahwa laju pertumbuhan tabungan Cina luar biasa tinggi, terlebih tabungan rumah tangga. Pada Grafik 3 total tabungan Cina dalam persentase GDP memperlihatkan bahwa tabungan rumah tangga menduduki posisi yang tinggi. Hal ini terjadi karena orang Cina rata-rata memiliki sifat yang hemat, ini juga disebabkan karena adanya perubahan keadaan jaminan sosial. Sebelum reformasi, semua orang di Cina dijamin jaminannya oleh negara, namun keadaan berubah setelah terjadinya reformasi. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraannya orang Cina cenderung untuk menabung dengan jumlah yang besar. Tabungan ini sebagian besar bertujuan untuk pendidikan, perumahan, pembelian peralatan rumah tangga, dan keamanan (seperti, pensiun dan biaya kesehatan).

Grafik 3
Rasio Tabungan Cina Beberapa Tahun Belakangan
(dalam persentase GDP)

⁵³*Loc. Cit*



Sumber: IMF World Economic Outlook, September 2005

Pada grafik 3 tabungan rumah tangga terjadi sedikit penurunan, dan tabungan perusahaan sedang bertambah besar secara cepat dan sekarang merupakan kategori yang paling penting. Keadaan ini terjadi, karena adanya perubahan pola hidup orang Cina yang semakin konsumtif dewasa ini, serta adanya program dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli konsumen di dalam negeri untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di samping data tersebut, laporan tahunan WTO Cina juga telah melakukan pendataan mengenai distribusi ODI Cina di berbagai negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

ODI Cina di Beberapa Negara

(1) Geographical distribution including trade business as of June 2001		(2) Top ten distribution excluding trade business as of the end of 2001	
	US\$ million		US\$ million
Hong Kong/Macao	3.683	United States	559
North America	1.074	Hong Kong	473
Asia	798	Canada	392
Africa	534	Australia	351
Latin America	307	Peru	200
Oceania	486	Thailand	194
Europe	1.102	Mexico	143
Total	7.782	Zambia	134
		Russia	130
		Cambodia	120
		Others	1.737
		Total	4.433

Sumber: (1) China WTO Report 2003 (北京：经济日报出版社, 2003),189.

(2) (Almanac of China's foreign economic relations and trade 2003), 1151-1155.

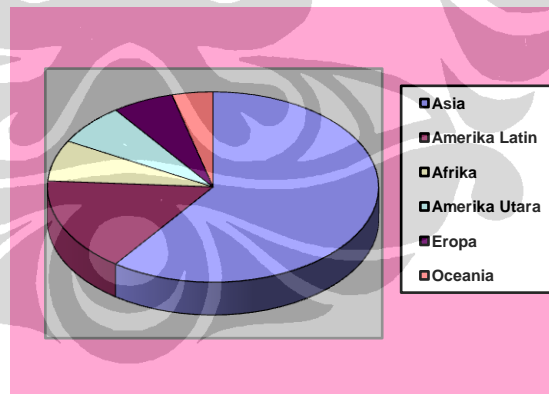
Pada tabel di atas, Hong Kong dan Macao menguasai hampir separuh ODI, namun tidak termasuk ODI dalam perdagangan, Amerika Serikat pun menjadi tujuan terbesar ODI di luar perdagangan. Pada September 2001, 49.7% ODI berhubungan dengan urusan perdagangan, 22.2% dalam hal produksi, dan 18.1 % dalam pengembangan SDA dan pembangunan lainnya; antara lain berupa pertanian, transportasi, konstruksi, pelayanan konsultan, dan pariwisata. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan di Cina pun berinvestasi dalam sektor pelayanan di negara

berperekonomian maju, termasuk Hong Kong, pengembangan SDA di negara-negara Amerika dan Australia, juga memproduksi berbagai industri di Asia dan Afrika.

Tabel tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu data yang termasuk bisnis perdagangan (*including trade business*) dan yang tidak termasuk bisnis perdagangan (*excluding trade business*). Maksud dari istilah tersebut yaitu mengacu kepada neraca pembayaran (*balance of payment*), yaitu antara *trade balance* yang terdiri dari ekspor impor dan *capital balance* yang termasuk ODI di dalamnya. Maka dari itu, bila pada tabel distribusi ODI secara geografis diketahui bahwa Hong Kong dan Macao yang menduduki peringkat pertama dengan nilai US\$ 3683 juta, maka kemungkinan besar negara tersebut lebih dominan pada bidang ekspor impor. Sedangkan bila AS menduduki peringkat pertama pada tabel sepuluh besar negara tujuan terbaik sasaran ODI Cina, maka bisa dikatakan bahwa AS lebih dominan dalam hal investasi, bukan ekspor impor seperti data tabel sebelumnya.

Selain itu, untuk lebih memahami mengenai persebaran ODI Cina di dunia, diagram berikut bisa memberikan gambaran lebih jelas.

Gambar 1
Persebaran ODI secara geografis pada tahun 2005



Sumber: MOFCOM⁵⁴

⁵⁴ Bomal Camille. *A New Leap Forward for China: Chinese Outward Direct Investment*. 2007. www.globalfinance.org/portal/data/publications/students/Chinese_ODI.pdf (diakses pada 13 Mei 2008), hal. 8.

Tabel 6
Pesebaran ODI Cina secara geografis pada tahun 2005

Wilayah Persebaran	Persentase ODI
Asia	60%
Amerika Latin	16%
Afrika	7%
Amerika Utara	7%
Eropa	6%
Oceania	4%

Sumber: MOFCOM (Data Diolah)

Terlihat bahwa Asia menguasai separuh lebih ODI Cina. Hal ini lebih dikarenakan banyak perusahaan Cina memprioritaskan negara yang dekat secara geografis sebagai tujuan investasi, yaitu negara-negara di Asia, dan Asia Tenggara pada khususnya. Di samping itu, penduduk Asia Tenggara dan Timur memiliki daya beli yang bagus, sangat cocok bagi Cina yang ingin mengembangkan kemampuannya dalam membangun pasar secara lebih matang.

Untuk lebih jelasnya daftar berikut adalah daftar tujuan utama ODI Cina yang didominasi oleh negara-negara di Asia:

Tabel 7
Tujuan Utama Aliran ODI Cina (2003-2005)

Country/Region	2003		2004		2005	
	Amount (US\$100M)	% of Total	Amount (US\$100M)	% of Total	Amount (US\$100M)	% of Total
Hong Kong	11.5	40.4%	26.3	47.8%	34.2	27.9%
Cayman Islands	8.1	28.3%	12.9	23.4%	51.6	42.1%
British Virgin Island	2.1	7.4%	3.9	7.0%	12.3	10.0%
South Korea	1.5	5.4%	0.4	0.7%	5.9	4.8%
Australian	—	—	1.3	2.3%	1.9	1.6%
USA	0.7	2.3%	1.2	2.2%	2.3	1.9%
Russia	0.3	1.1%	0.8	1.4%	2.0	1.6%
Indonesia	0.3	0.9%	0.6	1.1%	0,1	0,08
Sudan	—	—	1.5	2.7%	1.0	0.8%
Total	24.4	85.8%	48.7	88.6%	77.1	90.78%

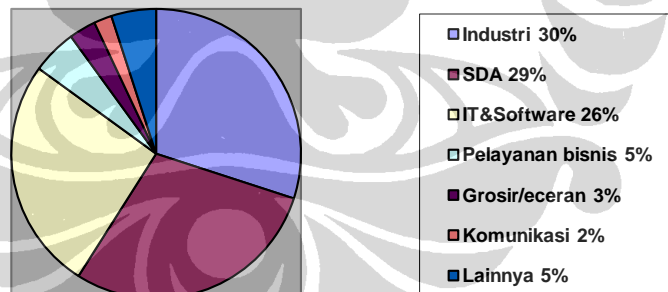
Sumber: 中国统计年鉴/中华人民共和国国家统计局编.

Pada tabel di atas terlihat bahwa Kep. Cayman dan British Virgin Island merupakan wilayah tujuan aliran ODI Cina periode 2003-2005 yang cukup besar. Bahkan pada tahun 2005 Kep. Cayman menjadi daerah tujuan investasi yang tertinggi dan mengalahkan Hong Kong yang biasanya selalu jadi primadona dalam tujuan aliran ODI. Di sini dapat dikatakan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan tempat tujuan bagi pengusaha-pengusaha Cina yang tersandung pada peraturan-peraturan pengetatan ketentuan dalam berinvestasi ke luar Cina, karena Kep. Cayman dan British Virgin Island merupakan wilayah *tax heaven*. Ini berarti bahwa pengusaha-pengusaha yang berusaha untuk menghindari pajak dari dalam negeri Cina atau perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang tetapi tidak memenuhi syarat untuk

berinvestasi ke luar, lebih memilih untuk mengalirkan investasi mereka ke kedua wilayah tersebut. Hal tersebut beralasan, karena dengan masuk ke wilayah tersebut, maka perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan lokal, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat dengan mudah pula melakukan investasi ke negara yang menjadi target awal investasi mereka. Dengan kata lain, kedua wilayah tersebut dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara bagi ODI Cina yang akan menuju ke wilayah lain.

Hingga saat ini, perusahaan di Cina memiliki tiga sektor utama dalam melakukan investasi, yaitu sumber daya alam (SDA) yang meliputi energi dan bahan baku, perdagangan, dan teknologi informasi (*information technology*). Hal ini ditujukan untuk dapat mendukung program pembangunan ekonominya dan mengembangkan perusahaan-perusahaannya, sebagaimana terlihat pada tujuan ODI Cina itu sendiri. Pada gambar 2 terlihat jelas bahwa sektor-sektor yang diminati berupa sektor-sektor penting yang masih belum atau tidak banyak dimiliki oleh Cina. Selengkapnya bisa dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2
Volume ODI Cina pada tahun 2005

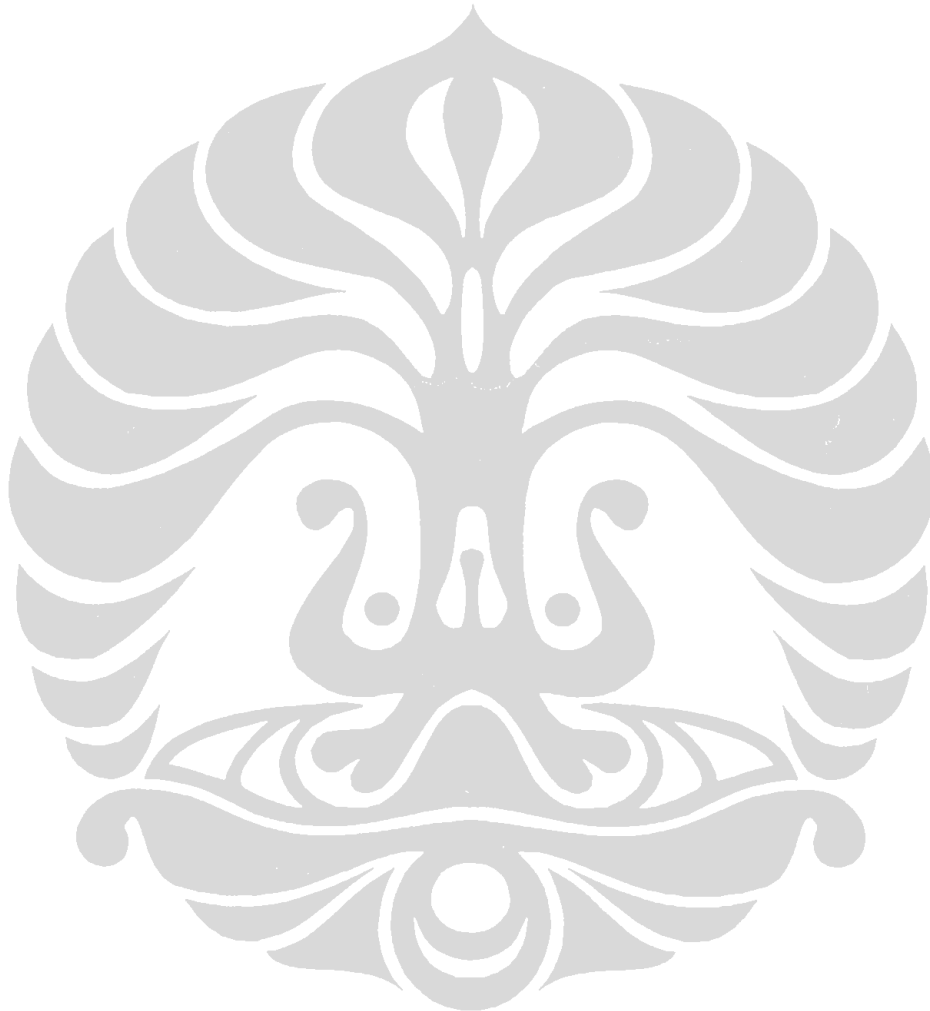


Sumber: MOFCOM⁵⁵

Dari data-data di atas sangat jelas bahwa Cina memiliki ketertarikan yang besar pada sektor-sektor yang tidak banyak dimilikinya. Selain itu, Cina pun membutuhkan beberapa negara di sekitarnya guna mendukung pengembangan perusahaan-perusahaannya untuk menjadi perusahaan berbasis internasional.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 9

Selanjutnya dengan adanya kebijakan '*go global*' tersebut, maka pemerintah Cina mendorong perusahaan-perusahaan lokalnya untuk berlomba-lomba menjadi '*global champion*' yang mampu menguasai pasar dunia.



BAB III INVESTASI CINA DI INDONESIA

III. 1. Sekilas Hubungan Cina dan Indonesia

Cina dan Indonesia, adalah dua bangsa yang sudah berabad-abad lamanya saling mengenal dan berhubungan. Jalinan sejarah yang panjang tersebut telah menjadi pengantar yang cukup panjang dalam upaya pembentukan hubungan diplomasi di antara kedua negara tersebut. Hubungan antara Republik Rakyat Cina dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi dibuka pada tanggal 28 Maret 1950, yaitu kurang lebih setahun setelah Cina diproklamasikan merdeka¹. Namun, hubungan antara kedua negara mulai memanas setelah terjadinya gejolak politik di Indonesia pada tahun 1960-an, dan ketika memasuki akhir tahun 1967 hubungan diplomasi antara Cina dan Indonesia terputus. Namun, seiring dengan perkembangan waktu hubungan ini mulai terjalin lagi ketika adanya keinginan Indonesia untuk memiliki peran yang lebih besar dalam diplomasi internasional. Pada saat itu Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menginginkan adanya peninjauan kembali hubungan antara Indonesia dengan Cina, serta adanya keinginan Indonesia pula untuk memperluas ekspor non-migas ke Cina. Saat itu, Indonesia pun memiliki ambisi untuk dapat menjabat kembali posisi sebagai ketua Gerakan Non Blok, yang berarti bila Indonesia tidak membuka kembali hubungannya dengan Cina, maka Indonesia akan dipandang oleh dunia internasional sebagai negara yang tidak netral dan dapat digolongkan sebagai negara yang memihak pada blok tertentu.

Di sisi lain, Cina saat itu sedang melakukan upaya-upaya penting untuk meningkatkan hubungan politiknya dengan semua negara tetangganya di Asia, baik yang dekat maupun yang jauh. Untuk melancarkan jalan bagi upaya itu, Beijing menegaskan bahwa Cina tidak lagi mendukung “perang pembebasan nasional” di luar negeri dan tidak akan membiarkan hubungan antarpartai mempengaruhi hubungan baik antarnegara. Cina yang saat itu dalam posisi terkucilkan akibat Peristiwa

¹ 1 Oktober 1949 merupakan hari kemerdekaan Republik Rakyat Cina

Tian'anmen merasa sangat berkepentingan dengan Indonesia, terlebih karena posisi penting Indonesia dalam keanggotaannya di ASEAN maupun Gerakan Non Blok, karena dengan mendekati diri dengan Indonesia berarti Cina memiliki jalan pula untuk membuka dialog kembali dengan beberapa negara di ASEAN maupun Non Blok, serta dapat memperbaiki kembali citranya yang sebelumnya selalu dicurigai sebagai negara penyebar pengaruh komunis di dunia, terlebih ketika adanya keterlibatan Cina pada beberapa partai komunis di beberapa negara Asia dan Perang Korea. Sebenarnya Cina telah memiliki landasan yang kuat dalam mencairkan hubungan diplomasinya di Asia Tenggara, yakni dengan adanya perbaikan hubungan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang telah lebih dulu dilakukannya, seperti Malaysia (1974), Filipina (1975), dan Thailand (1975). Namun, Cina semakin jelas melihat bahwa hubungan dengan Indonesia semakin krusial. Hal ini terungkap dalam memoar² mantan Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen, bahwa sesungguhnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara sangat bergantung pada perkembangan hubungan antara Indonesia dan Cina.³ Selain itu, faktor lain yang mendukung adanya normalisasi hubungan antara Cina-Indonesia ini, antara lain karena adanya rumusan ulang politik luar negeri Cina dalam hubungan dengan keturunan Cina di luar Cina daratan yang telah dianggap sebagai urusan masing-masing negara tempat mereka tinggal.⁴

Perbaikan hubungan ini telah dimulai pada tahun 1972, ketika Cina menjadi anggota PBB untuk menggantikan posisi Taiwan, dan Indonesia saat itu pun memberikan dukungan atas hal tersebut. Sebelumnya, hubungan diplomatik Indonesia – Cina sampai akhir tahun 1972 tidak dilakukan kontak, selama masa pembekuan hubungan diplomatik tersebut, seluruh kepentingan Indonesia di Cina diwakili oleh Kedutaan Besar Kamboja di Beijing dan kepentingan Cina di Indonesia

² Untuk informasi selengkapnya baca pada buku Qian Qichen, *Ten Episodes in China's Diplomacy*. (New York: Harper Collins, 2005).

³ Tuty Enoch Muas, "Hubungan Cina-Indonesia: Secara Historis, Dinamis!" dalam I. Wibowo (ed), *Merangkul Cina: Hubungan Cina-Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 35.

⁴ Christine Susanna Chin, "The Chinese Indonesian's Role in Substaining Sino-Indonesian Strategic Partnership", dalam *Indonesian Quarterly*, Vol. 35, No. 4, 2007, hal. 337.

diwakili oleh Kedutaan Besar Romania di Jakarta⁵. Peristiwa penting lainnya yang menandakan adanya sinyal-sinyal perbaikan hubungan antara Indonesia – Cina yaitu terjadi pada bulan Maret 1973, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Cina untuk pertama kali dalam beberapa dekade mengadakan pertemuan di Paris. Selanjutnya, pada bulan September 1976, Presiden Indonesia Soeharto mengirimkan telegram ucapan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Cina Pertama Mao Zedong.

Pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato pertanggungjawaban kepada SU MPR yang menegaskan bahwa masalah normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Cina merupakan salah satu faktor penting bagi perbaikan hubungan kedua negara tersebut. Dalam pernyataan Presiden Soeharto yang dikemukakan pada 1 Maret 1988 tersebut, masih mengaitkan dengan ketegasan Cina untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, khususnya Indonesia, serta tidak akan membantu sisa-sisa kekuatan komunis di negara yang bersangkutan. Perbaikan hubungan ini pun berdasarkan pada kesepakatan kedua negara untuk menggunakan Dasa Sila Bandung dan Lima Prinsip hidup berdampingan secara damai, yaitu:

1. Saling menghormati kedaulatan dan keutuhan masing-masing negara;
2. Saling tidak menyerang;
3. Saling tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri masing-masing;
4. Prinsip persamaan derajat dan kerjasama yang saling menguntungkan;
5. Hidup berdampingan secara damai.

Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia – Cina merupakan langkah awal ke arah peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Untuk keperluan ini kedua negara telah membentuk Komisi bersama yang mengatur kerjasama ekonomi, perdagangan dan teknologi. Dengan wadah tersebut kedua negara berusaha mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Melalui wadah komisi bersama itu kedua belah pihak berusaha mengevaluasi dan mengidentifikasi kerja sama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap sesuai dan

⁵ *Ibid*

cocok untuk kepentingan kedua negara. Ini berarti di bidang kerjasama ekonomi akan banyak ditemukan persoalan-persoalan yang tidak ringan, terutama yang menyangkut strategi pembangunan ekonomi kedua negara yang tidak selalu sama, begitu juga sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Sebenarnya sejak tahun 1986, nilai perdagangan Indonesia – Cina telah meningkat. Ekspor Indonesia ke Cina meningkat dari US\$139,0 juta (1986) menjadi US\$568,5 juta (1989) dan impor dari Cina meningkat dari US\$337,1 juta (1986) menjadi US\$527,4 juta (1989). Produk-produk ekspor utama Indonesia ke Cina adalah kayu lapis, kayu olahan, produk-produk metal, karet alam, pupuk, dan sebagainya. Sementara kapas, biji-bijian yang mengandung minyak, sayur-mayur, produk kimia dan alat-alat mesin diimpor dari Cina. Dapat dilihat bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kedua negara saling melengkapi.

Pada akhir tahun 1970, Indonesia mencoba memulai hubungan dengan Cina, seperti halnya yang dilakukan pemerintah Cina pada Juni 1979 ketika mengizinkan Kadin Indonesia mengirim delegasinya ke Cina. Hal ini pun mendapat sambutan baik dari pihak Cina. Terbukti dengan dilakukannya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Singapura antara Ketua Kadin Indonesia, Sukamdani, dengan Konsul Promosi Perdagangan Internasional Cina (CCPIT), Wang Yaoting, mengenai hubungan dagang langsung antara kedua negara. Terkait dengan hubungan dagang bilateral tersebut, 23 Juli 1985 dikeluarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung Cina-Indonesia yang isinya antara lain mengatur masalah-masalah yang menyangkut komoditi, tata niaga, dan keimigrasian. Tak lama kemudian, pada 27 Juli 1985, Ketua Kadin Indonesia, Sukamdani, dan 120 pengusaha Indonesia berkunjung ke Cina dan pada tanggal 28 Juli 1985 kedua pihak menyetujui MoU mengenai perdagangan langsung. Pada akhirnya, 25 Mei 1989 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No 5 tahun 1989 tentang koordinasi pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung RI-RRC.

Pada tanggal 8 Agustus 1990, atas undangan Presiden Indonesia Soeharto, Perdana Menteri (PM) Cina Li Peng mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan

Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen yang disaksikan oleh Presiden Indonesia Soeharto dan PM Cina Li Peng menandatangani MOU mengenai pemulihan hubungan diplomatik Indonesia – Cina dan Persetujuan Dagang Indonesia – Cina⁶. Kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Soeharto ke Cina untuk pertama kalinya setelah normalisasi hubungan diplomatik dilakukan pada tanggal 14-18 Nopember 1990⁷, kunjungan tersebut merupakan kunjungan kenegaraan balasan terhadap kunjungan PM Cina Li Peng pada bulan Agustus 1990 ke Indonesia. Dalam kunjungan Presiden Indonesia Soeharto tersebut antara lain diadakan penandatanganan MOU mengenai pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Kerjasama Teknik dan “Agreed Minutes” pembicaraan tentang kerjasama perdagangan dan ekonomi yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuwasbang) Indonesia, Radius Prawiro, dan Menteri Kerjasama Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan (MOFERT) Cina, Zhang Tuo Bin, pada tanggal 17 November 1990 dan dikeluarkannya “Joint Press Communique”. Disamping itu, dalam kesempatan kunjungan tersebut Presiden Indonesia Soeharto melalui Duta Besar Indonesia memberikan sumbangan kepada Masjid Dongsi di Beijing sebesar US\$30.000 dan telah diterima oleh Imam Masjid H. Shaleh An Shi Wei pada tanggal 16 November 1990⁸.

Setelah menjalin hubungan diplomatik selama delapan tahun, hubungan antara Cina dan Indonesia memasuki tahap baru sejak jatuhnya rezim Soeharto (Orde Baru). Kejatuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi hubungan kedua negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembicaraan bilateral antara Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan Presiden Cina Jiang Zemin pada pertemuan APEC tahun 1998 di Kuala Lumpur. Kedua pemimpin ini membicarakan tentang perlunya peningkatan kemitraan diantara kedua negara. Di sini dapat terlihat bahwa Indonesia dalam kacamata politik Cina, masih merupakan

⁶ Informasi Singkat Mengenai Fakta Perkembangan Hubungan RI – RRC sejak KBRI di Beijing didirikan tahun 1950, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beijing, 1996.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

sebuah negara yang penting bagi perkembangan politiknya, mengingat posisi penting Indonesia dalam keanggotaan ASEAN dan adanya keinginan Cina dalam meningkatkan hubungan ekonominya dalam lingkungan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Selain itu, peningkatan hubungan kedua negara mulai semakin berkembang sejak kunjungan Presiden Keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Desember 1999 yang menghasilkan kesepakatan dengan Presiden Cina Jiang Zemin yang tertuang dalam Komunique Bersama Indonesia – China. Komunique ini bertujuan untuk membangun kerjasama menyeluruh yang stabil, bertetangga yang baik, dan saling membangun rasa percaya antar kedua negara. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari kunjungan kenegaraan pertama Gus Dur ke Beijing. Pertama, kunjungan Gus Dur ke Beijing menandakan sebuah era baru hubungan bilateral RI-RRC dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kedua, kunjungan ini menunjukkan bahwa Indonesia menginginkan adanya hubungan yang lebih baik dengan Cina dan juga sebaliknya. Kunjungan Gus Dur ke Beijing memberikan semangat baru bagi hubungan Cina-Indonesia atas dasar hubungan yang adil dan transparan. Pada kunjungan tersebut, Gus Dur juga berjanji untuk meningkatkan ekonomi dan perdagangan antara kedua belah pihak yang telah meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu langkah konkret dari kesepakatan dan komitmen Cina-Indonesia adalah adanya dokumen kerangka kerja sama yang berorientasi pada abad ke-21 dan pembentukan Komisi Bersama RI-RRC. Dari kesepakatan ini diharapkan hubungan Cina-Indonesia tidak lagi diwarnai dengan sentimen ras dan ideologi, tetapi lebih konkret pada kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perdagangan, politik dan keamanan, serta isu internasional seperti masalah hak asasi manusia.

Keinginan untuk bekerja sama ini juga ditunjukkan pula oleh pihak Beijing dengan memberikan bantuan sebesar 5 milyar dollar AS kepada Gus Dur pada tanggal 1 Desember 1999, serta diteruskannya fasilitas kredit sebesar 200 juta dollar AS untuk membeli bahan makanan. Selain itu, pada kunjungan Gus Dur tersebut juga terdapat berbagai kerja sama, seperti kerja sama keuangan, teknologi, perikanan,

promosi kunjungan wisata, serta kerja sama dalam bentuk *counter-trade* di bidang energi dengan menukar LNG Indonesia dengan produksi-produksi Cina. Dalam pembicaraan antara Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid dengan Presiden Cina Jiang Zemin pada bulan Desember 1999 tersebut, telah disepakati mengenai perlunya peningkatan pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi pemerintah, anggota Parlemen, masyarakat bisnis, partai politik dan tokoh masyarakat. Tujuan kunjungan ini antara lain untuk meningkatkan pula adanya *people to people contact* antar dua negara. Ketika memperingati hubungan Cina-Indonesia yang kelimpuluh, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Dr. Alwi Shihab berkunjung ke Cina pada 7- 11 Mei 2000. Dalam kunjungan tersebut telah ditandatangani pula dua dokumen penting yakni MoU tentang pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral (*Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation*) dan Dokumen kerangka Kerjasama Bilateral yang berorientasi ke Abad 21 (*Joint Statement on the Future Directions of Bilateral Cooperation*). Kunjungan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil pada waktu kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid, Desember 1999. Komisi Bersama⁹ untuk Kerjasama Bilateral yang dimaksud merupakan nomenklatur baru pada tingkat Menlu dan disepakati untuk digunakan sebagai payung bagi berbagai mekanisme bilateral lainnya yang bersifat sektoral. Pada Pertemuan Konsultasi Bilateral Tingkat Pejabat Tinggi (SOM)¹⁰ kelima di Jakarta, April 1999 disepakati pembentukan mekanisme mengenai : Dialog keamanan; Forum Konsultasi Kekonsuleran dan Keimigrasian; serta Pertukaran kunjungan antar pejabat Kementerian Luar Negeri kedua negara guna menunjang peningkatan dan pengembangan hubungan bilateral.

Kemudian hubungan ini pun dilanjutkan dengan adanya kunjungan dari PM Cina Zhu Rongji ke Indonesia pada 7–11 November 2001. Pada kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lima persetujuan yaitu MoU Kerjasama Pertanian,

⁹ Pada bulan April 2004, Menlu kedua negara pun telah melakukan pertemuan pertama Komisi Bersama di Beijing.

¹⁰ Mekanisme hubungan dan kerjasama di bidang politik terjalin dalam bentuk Konsultasi Bilateral Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) merupakan hasil dari kesepakatan antar Menlu kedua negara sejak tahun 1990 dan dilaksanakan secara bergantian.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Persetujuan Kebudayaan, Persetujuan mengenai Pengaturan Kunjungan Wisatawan RI – RRC, dan Persetujuan Pemberian Hibah sebesar 40 juta Yuan. Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri pun melakukan kunjungan balasan pada 24 Maret 2002¹¹ ke Cina dan menandatangani Nota Kesepahaman (*Exchange of Notes*) mengenai pembukaan Konsulat Jenderal Indonesia di Cina dan Konsulat Jenderal Cina di Indonesia. Nota Kesepahaman tersebut juga berisi mengenai bantuan hibah yang berkenaan dengan kerjasama ekonomi dan teknik, MoU pembentukan *Indonesia-China Energy Forum* yang juga meliputi kerjasama di sektor energi, serta MoU Kerjasama Ekonomi dan Teknik dalam Proyek Jembatan, Jalan Tol serta proyek infrastruktur lainnya. Penandatanganan kesepahaman antar dua negara (*Memorandum of Understanding/ MoU*) ini bertujuan untuk terus lebih mengembangkan dan mengokohkan lagi hubungan serta kerjasama antara Indonesia– Cina di semua sektor.

Hubungan antara Cina dan Indonesia terus berlanjut sampai pada pergantian presiden di Indonesia. Pada tanggal 25 April 2005, pemimpin kedua negara tersebut, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Hu Jintao menandatangani “Deklarasi Bersama Tentang Pembinaan Kemitraan Strategis antara RRC-RI” di Jakarta. Ini mencerminkan adanya transformasi dalam hubungan kedua negara. Tujuan dari kemitraan strategis ini antara lain untuk mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas, kemakmuran, pembangunan bersama, dan keharmonisan hidup berbangsa. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan, serta kerjasama sosial budaya, sehingga memungkinkan untuk dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dan luas. Adanya peningkatan hubungan antara kedua negara tersebut, sebenarnya tidak terlepas dari peranan penting Indonesia sebagai kawasan pemasaran industri, serta pemasok bahan-bahan mentah yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan perekonomiannya, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tujuan investasi Cina ke negara-negara berkembang adalah untuk mengakses bahan-bahan mentah yang juga banyak dihasilkan di Indonesia.

¹¹ Tempo Interaktif

Sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut, pada tanggal 27-30 Juli 2005 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan yang terdiri dari rombongan pengusaha dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina untuk membalas kunjungan Presiden Cina Hu Jintao ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan langkah bagi Cina untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Kunjungan Presiden Indonesia ini merupakan kunjungan yang sangat disambut baik oleh kalangan pebisnis di Indonesia, karena dengan adanya peningkatan hubungan kedua negara ini, maka perdagangan Indonesia dengan Cina akan meningkat sebesar US\$5 milyar selama tiga tahun, yaitu tepatnya meningkat dari US\$15 milyar pada tahun 2005 menjadi US\$20 milyar pada tahun 2008. Pada kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan timnya telah memegang kontrak perdagangan dan investasi senilai US\$20 milyar.¹² Sebulan berikutnya Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Jusuf Kalla beserta rombongan yang terdiri dari kalangan pebisnis, juga berkunjung ke Beijing. Pada kunjungan ini, Wapres Jusuf Kalla juga mengimbau agar investor Cina mau datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya.

III. 2. Indonesia di antara Cina dan ASEAN

Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang mencakup wilayah Indochina, semenanjung Malaya, dan kepulauan Nusantara. Secara geografis wilayah Asia Tenggara berbatasan langsung dengan Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia, sehingga bila dilihat dari segi geografis dan ekonomis, negara-negara Asia Tenggara memiliki posisi yang strategis dan menguntungkan. Selain itu, kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN*) yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada awalnya, keanggotaan ASEAN hanya

¹² Syamsul Hadi, Ph.D, "Hubungan Cina-Indonesia di Era Pasca Orde Baru: Perspektif Indonesia", makalah dalam seminar sehari *Setelah Air Mata Kita Kering: 10 Tahun Sesudah Tragedi Tionghoa Mei 1998*, Centre for Chinese Studies FIB-UI, Jakarta, 3 Mei 2008.

terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN pun mulai bertambah, dan dewasa ini ASEAN telah memiliki sepuluh anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Sebagaimana seperti yang tercakup pada deklarasi ASEAN, tujuan dari terbentuknya ASEAN antara lain sebagai berikut: (1) Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan pengembangan kebudayaan dan kemasyarakatan di kawasan; (2) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan.¹³

ASEAN memiliki sebuah wadah dalam menjalin hubungan ekonominya, yaitu *ASEAN Economic Community*. Komunitas ini merupakan bagian dari *Vision ASEAN 2020*¹⁴ yang bertujuan untuk menciptakan daerah perekonomian yang stabil, sejahtera dan sangat bersaing. Hal ini menyangkut pada aliran barang-barang, jasa, investasi dan modal untuk lebih bebas, serta memungkinkan pula agar perkembangan ekonomi merata, pengurangan kemiskinan dan perbedaan sosio-ekonomi di tahun 2020. Komunitas Ekonomi ASEAN juga bertujuan agar ASEAN dapat menjadi sebuah basis pasar dan produksi, membentuk sebuah kawasan yang berfungsi sebagai pelengkap bisnis, sehingga dapat menjadikan ASEAN sebagai rantai persediaan global yang lebih dinamis dan lebih kuat. Strategi ini juga memungkinkan agar terjadinya integrasi di antara negara-negara anggota, serta memungkinkan pula agar terciptanya peningkatan daya saing ekonomi ASEAN. Untuk mendukung hal tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu sebagai berikut¹⁵:

- Mengadakan mekanisme dan pengukuran baru untuk memperkuat pelaksanaan ekonomi, seperti dilaksanakannya Perdagangan Bebas

¹³ ASEAN Secretariat www.aseansec.org

¹⁴ ASEAN Vision 2020 disetujui pada pertemuan pemimpin negara-negara ASEAN ketika memperingati hari ulang tahun ASEAN Ketigapuluh. ASEAN Vision 2020 merupakan sebuah persetujuan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan agar negara-negara ASEAN dapat berwawasan luas, hidup damai, stabil dan makmur, terikat dalam kebersamaan kerjasama yang dinamis dan memiliki komunitas yang terlindungi.

¹⁵ *Ibid*

ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/ AFTA*), Kerangka Kerjasama ASEAN atas Pelayanan Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services/ AFAS*) dan Area Investasi ASEAN (*ASEAN Investment Area / AIA*);

- Mempercepat integrasi kawasan pada sektor-sektor prioritas menjelang tahun 2010, yaitu: perjalanan udara, pertanian, otomotif, perdagangan, elektronika, perikanan, kesehatan, produk-produk berbahan karet, tekstil dan pakaian, kepariwisataan, dan produk-produk berbahan kayu.
- Memfasilitasi perpindahan pebisnis, pekerja terampil dan terlatih, serta
- Memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, termasuk meningkatkan Mekanisme Perselisihan Mengenai Kependudukan ASEAN (*ASEAN Dispute Settlement Mechanism*).

Adanya kerjasama ini memungkinkan pula mewujudkan cita-cita ASEAN dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan pengembangan kebudayaan dan kemasyarakatannya. Selain itu, ASEAN juga membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas terpadu dalam pengembangan ekonominya, yaitu AFTA. AFTA didirikan pada tahun 1992, tujuan didirikannya AFTA antara lain untuk mempromosikan keuntungan kompetitif kawasan sebagai unit produksi. Selain itu, untuk mendukung kegiatan ekonomi ASEAN yang terintegrasi dalam AFTA, maka ASEAN pun membangun:

- Rencana Keuangan dan Integrasi Moneter (*Roadmap for Financial and Monetary Integration*) ASEAN, yang terletak pada: perkembangan pasar modal, liberalisasi rekening modal, liberalisasi jasa keuangan dan kerjasama mata uang;
- Jaringan transportasi Trans-ASEAN terdiri atas jalan raya dan jaringan-jaringan jalur kereta api antar-negara, termasuk jalur kereta api Singapura-Kunming, pelabuhan-pelabuhan utama, dan jalur laut untuk lalu-lintas perkapalan, angkutan air daerah pedalaman, dan hubungan penerbangan sipil;

- Pengoperasian dan pengubungan peralatan dan jasa telekomunikasi, seperti membentuk sebuah badan pengawas telekomunikasi ASEAN yang bernama *ASEAN Telecommunications Regulators Council Sectoral Mutual Recognition Arrangement (ATRC-MRA)*;
- Jaringan energi Trans-ASEAN, yang terdiri dari Jaringan Tenaga ASEAN (*ASEAN Power Grid*) dan Proyek Jalur Pipa Gas Trans-ASEAN (*Trans-ASEAN Gas Pipeline Projects*);
- Prakarsa untuk Integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration*) yang mefokuskan pada prasarana, perkembangan sumber daya manusia, informasi dan teknologi komunikasi, serta integrasi ekonomi kawasan terutama di negara-negara CLMV.
- Kampanye ‘Visit ASEAN’ dan perizinan ASEAN untuk memajukan kepariwisataan intra-ASEAN; dan
- Persetujuan atas Cadangan Keamanan Pangan ASEAN (*Agreement on the ASEAN Food Security Reserve*).

Proyek-proyek raksasa yang dilakukan negara-negara ASEAN ini merupakan sebuah langkah awal dalam menghadapi globalisasi di kawasan tersebut. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN sepertinya sadar akan posisi strategisnya dalam perekonomian dan perdagangan dunia, apalagi hal ini didukung pula dengan kemampuan perekonomian ASEAN yang memiliki sumber daya alam berlimpah serta sumber daya manusia yang cukup banyak pula. Selain itu, selain meningkatkan integritas di tiap negara anggota, ASEAN pun juga mengembangkan kerjasamanya pada beberapa kawasan lain, terutama kawasan Asia Timur. Kerjasama baru ini tertuang dalam Pernyataan Bersama atas Kerjasama Asia Timur (*Joint Statement on East Asia Cooperation*) pada tahun 1999, kerjasama antara negara Asia Tenggara dan Timur Laut ini telah dilaksanakan pada pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN, dan para pemimpin negara-negara Asia Timur Laut seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan pun juga diundang untuk menandatangani kerjasama yang lebih dikenal sebagai ASEAN+3 ini. Dewasa ini, hubungan ASEAN+3 terus berkembang dan mendalam, terutama di bidang dialog keamanan dan kerjasama, kejahatan

transnasional, perdagangan dan investasi, lingkungan, keuangan dan moneter, pertanian dan kehutanan, energi, kepariwisataan, kesehatan, tenaga kerja, kebudayaan dan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, kesejahteraan sosial dan perkembangan, kaum muda, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, dewasa ini rencana perdagangan bilateral pun telah dilaksanakan antara negara anggota ASEAN+3, perjanjian ini berfungsi sebagai komponen dalam melaksanakan perdagangan bebas di kawasan Asia Timur dalam jangka panjang.

Adanya kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara Asia Timur Laut merupakan sebuah langkah besar yang telah ditempuh oleh kedua kawasan ini, dan ini merupakan langkah awal sebagai terbentuknya sebuah kerjasama ekonomi dua kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Dalam hal ini, ASEAN cukup memiliki peranan yang cukup penting bagi negara-negara Asia Timur Laut tersebut, karena selain memiliki posisi geografis yang cukup berdekatan, ASEAN juga memiliki posisi ekonomis dan politis yang penting bagi negara-negara Asia Timur tersebut. Secara geografis dan ekonomis, ASEAN meliputi daerah yang merupakan jalur perdagangan bagi kawasan Asia Timur Laut untuk menuju ke kawasan lainnya di belahan bumi ini, sehingga bila negara-negara Asia Timur tersebut tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan ASEAN maka secara tidak langsung akan berimbas pula pada perkembangan perekonomian dalam negeri mereka. Selain itu, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah dan sebagian besar sumber daya alam ini juga merupakan sumber bahan baku bagi produk-produk yang dihasilkan di negara-negara Asia Timur Laut, khususnya Cina. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diinginkan Cina dalam mendukung pembangunan ekonominya yang membutuhkan banyak bahan mentah yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN, terutama minyak. Secara keseluruhan negara-negara Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai kawasan yang memiliki cadangan minyak yang sedikit dibandingkan dengan kawasan lain di dunia ini. Namun, Cina tetap memandang ASEAN merupakan kawasan yang memiliki potensi yang cukup penting. Hal ini, berkaitan erat pula

dengan kebutuhan Cina akan pasokan minyak dari kawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya yang juga melewati kawasan ini. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Filipina, bahkan dianggap penting dalam diplomasi Cina untuk mengeksplorasi minyak.

Gambar 1
Peta ASEAN



Sumber: www.miniwiki.org

III.2.1. ODI Cina di ASEAN

Peningkatan kerjasama di bidang ekonomi antara ASEAN dan Cina mulai meningkat ketika adanya keputusan untuk membentuk zona perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Ini merupakan tanggapan dari usulan yang dikemukakan

oleh Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada saat diberlangsungkannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN VI pada bulan November 2000.¹⁶ Ini mengindikasikan akan pentingnya posisi ASEAN dalam dunia diplomasi Cina, karena dengan meningkatkan hubungan politik dan ekonominya, maka akan mungkin Cina dapat dengan mudah pula mengakses bahan mentah yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dapat diperkuat pula dengan adanya proyek raksasa yang dimiliki ASEAN dalam program AFTA-nya yaitu membangun Jaringan energi Trans-ASEAN, yang memungkinkan pula untuk dapat disambungkan langsung ke daratan Cina, sehingga memudahkannya mengakses energi yang dibutuhkan dalam jumlah besar belakangan ini. Ketika menghadiri KTT ASEAN+1 V di Brunei Darusalam, Zhu pun kembali menekankan bahwa sangat penting bagi ASEAN dan Cina untuk fokus pada kerjasama antar kedua pihak dan mempromosikan Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Cina (*ACFTA--ASEAN-China Free Trade Agreement*), sehingga dapat meningkatkan perekonomian kedua kawasan tersebut. Selanjutnya pada bulan November 2002, saat dilangsungkannya KTT ASEAN VIII di Phnom Phen, Kamboja, ASEAN dan Cina sepakat untuk menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Cina, Kerangka Kesepakatan ini pada intinya bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi bagi kedua pihak. Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Cina ini pada tahap selanjutnya pun akan dikembangkan lagi menjadi Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Cina (*ACFTA-- ASEAN-China Free Trade Agreement*), yang akan dirampungkan pada tahun 2012 mendatang. Kesepakatan ini merupakan cerminan dari adanya penguatan dan perluasan hubungan ekonomi dan politik di antara kedua pihak.¹⁷ Menurut banyak ahli, adanya ACFTA ini akan meningkatkan pertumbuhan

¹⁶ S. Chirativat and S. Mallikamas. "The Potential Outcomes of China-ASEAN FTA: Politic-Economic Implications for Participating Countries", dalam H.K. Leong dan S.C.Y. Ku, eds., *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, (Singapura dan Taiwan: Institute of SouthEast Asian Studies dan Center for Souteast Asian Studies: 2005), hal. 80-107.

¹⁷ S. Danyang. "ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospects", dalam S. Swee-Hock et al., eds., *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, (Singapura: Institue of Southeast Asian Studies (ISEAS)), hal 208-280.

perdagangan antar anggota dan merestrukturisasi ekonomi kedua pihak guna mencapai efisiensi, serta dapat meningkatkan daya saing¹⁸.

Tampaknya Cina sedang melancarkan strategi baru, yang disebut para ahli sebagai *Charm offensive*. Strategi ini merupakan cara Cina dalam menanamkan pengaruhnya untuk menarik dan meyakinkan, serta tanpa melalui pemaksaan kekuasaan militer, melainkan melalui budaya, nilai-nilai politik bangsa, dan kebijakan luar negeri.¹⁹ Strategi ini dijalankan Cina dalam rangka untuk mengambil simpati dan meningkatkan citranya di Asia, termasuk Indonesia ketika Cina memutuskan untuk tidak mendevaluasi mata uangnya, yang dianggap pemerintah Cina bahwa mendevaluasi mata uang negara-negara Asia yang terkena krisis akan semakin menjatuhkan nilai mata uang tersebut.²⁰ Dalam hal ini, untuk mendekati dan menarik simpati negara-negara Asia, termasuk juga Indonesia, Cina pun saat itu mengambil inisiatif dalam menyediakan dana melalui IMF sebesar US\$4,5 milyar untuk membantu Thailand dan Indonesia. Selain itu, ketika sebagian besar negara-negara Asia Tenggara terkena musibah *tsunami* Aceh Cina pun turut ambil bagian dalam pertolongan kepada korban peristiwa tersebut pada tahun 2004, dengan cara menyediakan dana sebesar US\$60 milyar. Bantuan keuangan yang cukup besar (US\$2 juta) plus bantuan obat-obatan senilai US\$1,25 juta dikirimkan pula oleh Cina ketika Yogyakarta dan sekitarnya dilanda bencana gempa bumi.²¹

Di sini dapat dilihat, bahwa Cina masih memainkan strategi *Charm offensive* dalam hubungannya dengan Asia Tenggara, ditambah lagi pada pembukaan acara pembukaan 'Forum Boao'²² di Pulau Hainan Perdana Menteri Cina Wen Jiabao

¹⁸ K. G. Cai. 'The ASEAN-China Free Trade Agreement and East Asia Regional Grouping', *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25 No 3, (2003), hal. 387-404.

¹⁹ Joseph S Nye Jr, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004), hal. 5-11.

²⁰ Natalia Soebagjo, "Tebar Pesona di Indonesia: Cara Cina Mengambil Hati Indonesia", dalam I. Wibowo (ed), *Merangkul Cina: Hubungan Cina-Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.. 110

²¹ Muas, *Op.cit*, hal. 44

²² Forum Boao (博鳌亚洲论坛Bó'áo Yàzhōu Lùntán/ *Boao Forum for Asia*) adalah forum internasional non-profit bermodelkan seperti *World Economic Forum* di Davos, Swiss, yang diadakan tiap tahun di kabupaten Boao, propinsi Hainan. Forum tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2002, dan memiliki Sekretariat di Beijing. Forum tersebut baru-baru ini dilaksanakan pada

mengumumkan pembentukan dana senilai US\$10 milyar untuk membantu membangun proyek-proyek infrastruktur di Asia Tenggara. Wen saat itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi krisis keuangan global untuk mencapai interkoneksi secara bertahap dan membangun jaringan, serta untuk mempromosikan integrasi ekonomi regional.²³

Tabel 1
Negara-Negara Sahabat Investor di ASEAN

Negara	Nilai (juta US\$)				Persentase Total Penerimaan Investasi (Share to total inflow)				Persentase Perubahan Pertahun (%)	
	2004	2005	2006	2002 - 2006	2004	2005	2006	2002 - 2006	2004 - 2005	2005 - 2006
Uni-Eropa ¹	10.048,1	11.139,6	13.361,9	44.955,6	28,6	27,1	25,5	26,3	10,9	19,9
Jepang	5.732,1	7234,8	10.803,3	30.813,7	16,3	17,6	20,6	18,0	26,2	49,3
ASEAN	2803,7	3765,1	6.242,1	19.377,7	8,0	9,2	11,9	11,3	34,3	65,8
Amerika Serikat	5.232,4	3010,6	3.864,9	13.736,1	14,9	7,3	7,4	8,0	(42,5)	28,4
Korea Selatan	806,4	577,7	1.099,1	3.347,3	2,3	1,4	2,1	2,0	(28,4)	90,2
Cina	731,5	502,1	936,9	2.302,9	2,1	1,2	1,8	1,3	(31,4)	86,6
Australia	566,7	195,9	399,2	1.444,3	1,6	0,5	0,8	0,8	(65,4)	103,8
India	118,7	351,7	(380,4)	295,1	0,3	0,9	(0,7)	0,2	196,4	(208,2)
Kanada	301,2	161,3	274,0	1.184,9	0,9	0,4	0,5	0,7	(46,5)	69,9
Rusia ²	-	-	5,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Selandia Baru	3,5	480,7	(282,8)	392,1	0,0	(0,5)	(0,5)	0,2	13.507,	(158,8)
Pakistan	4,8	3,5	3,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6	125,2
									(27,0)	
Total Negara Sahabat (Terpilih)	26.347,1	27.422,9	36.331,7	117.866,4	75,0	66,8	69,4	69,0	4,1	32,5

tanggal 17 sampai 19 April 2009 dan mengundang kepala pemerintah, tokoh pengusaha, serta pakar dari kawasan Asia dan benua lain untuk membahas langkah-langkah penanggulangan krisis moneter internasional.

²³ Reuters, Minggu 19 April 2009.

Lainnya ³	8.770,1	13.644,9	16.047,9	52.995,4	25,0	33,2	30,6	31,0	55,6	17,6
Total	35.117,2	41.067,8	52.379,5	170.821,9	100,0	100,0	100,0	100,0	16,9	27,5

Sumber Data: Database Perdagangan ASEAN (ASEAN Secretariat)

Catatan:

- Tidak tersedia saat dipublikasikan
- x Tidak tersedia/ tidak dikumpulkan
- n.a *not applicable* (Tidak dapat dipakai)
- 0,0 Kurang dari 0,1 %
- 1 Termasuk Austria, Belgia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris Raya.
- 2 Tidak ada pemisahan data yang ada; termasuk 'Lainnya'.
- 3 Aliran dari semua negara, termasuk Rusia, sebagaimana total investasi ulang yang diperoleh di Filipina (hanya Bank-bank lokal) pada tahun 2002-2006.

Tabel 2
TOP 10 Negara-Negara Investor di ASEAN

Negara ¹	Nilai (juta US\$)				Persentase Total Penerimaan Investasi (Share to total inflow)			
	2004	2005	2006	2002-2006	2004	2005	2006	2002-2006
Uni-Eropa	10.046,1	11.139,6	13.361,9	44.955,6	28,6	27,1	25,5	26,3
Jepang	5.732,1	7234,8	10.803,3	30.813,7	16,3	17,6	20,6	18,0
ASEAN	2803,7	3765,1	6.242,1	19.377,7	8,0	9,2	11,9	11,3
Amerika Serikat	5.232,4	3010,6	3.864,9	13.736,1	14,9	7,3	7,4	8,0
Amerika Tengah & Selatan²	(60,5)	919,4	1.035,1	3.958,3	(0,2)	2,2	2,0	2,3
Hong Kong	529,6	773,0	1.353,4	3.430,7	1,5	1,9	2,6	2,0
Korea Selatan	806,4	577,7	1.099,1	3.347,3	2,3	1,4	2,1	2,0
Kep. Cayman	2.029,1	(19,9)	476,4	3.003,7	5,8	(0,0)	0,9	1,8
Taiwan	366,8	(66,8)	668,1	2.417,4	1,0	(0,2)	1,3	1,4
Cina	731,5	502,1	936,9	2.302,9	2,1	1,2	1,8	1,3
Total TOP 10	28.217,1	27.835,4	39.841,2	127.343,3	80,4	67,8	76,1	74,5
Lainnya³	6.900,1	13.232,4	12.538,3	43.478,5	19,6	32,2	23,9	25,5
Total	35.117,2	41.067,8	52.379,5	170.821,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber Data: Database Perdagangan ASEAN (ASEAN Secretariat)

Catatan:

- Tidak tersedia saat dipublikasikan
- x Tidak tersedia/ tidak dikumpulkan
- n.a *not applicable* (Tidak dapat dipakai)
- 1 Berdasarkan pada kumulatif aliran investasi dari tahun 2001-2005
- 2 Termasuk negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, selain dari Argentina, Brasil, Meksico, dan Panama
- 3 Termasuk aliran dari semua negara, seperti total intestasi ulang yang diperoleh di Filipina (hanya Bank-bank lokal) pada tahun 2001-2005 dan pinjaman antar perusahaan di Singapura pada tahun 2005. Ranking berdasarkan pada negara-negara dimana data tersedia.

Peningkatan hubungan perekonomian antara Cina dan ASEAN, berdampak pula pada dunia investasi di ASEAN. Cina yang sebelumnya hanya dikenal oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai mitra dagangnya, dewasa ini justru lebih dikenal sebagai salah satu investor terbesar di ASEAN. Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa terjadinya peningkatan aliran investasi yang masuk ke negara-negara ASEAN dari Cina tiap tahunnya, bahkan pada tabel 1 ditunjukkan pula bahwa Cina menduduki peringkat kesepuluh dari sepuluh negara-negara investor di kawasan ASEAN, dengan persentase pertumbuhan 1, 3 persen dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Sebenarnya ini merupakan angka yang kecil untuk ukuran negara berperekonomian besar seperti Cina. Angka ini sangat jauh di bawah Korea Selatan, Hong Kong, Kepulauan Cayman, dan Taiwan. Namun, investasi yang datang dari Hong Kong atau Kepulauan Cayman dapat diindikasikan pula sebagai investasi yang juga berasal dari Cina, karena kedua daerah ini merupakan daerah tujuan utama ODI Cina. Namun, jika dilihat dari persentase perubahan angka investasinya, Cina dapat digolongkan sebagai negara yang memiliki angka pertumbuhan investasi di ASEAN yang cukup cepat. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2 yang memperlihatkan bahwa persentase perubahan angka investasi Cina di kawasan ASEAN meningkat pada tahun 2005-2006 yaitu sebesar 86,6%, ini jauh tinggi di dibandingkan dengan persentase perubahan angka investasi dari negara-negara Uni-Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan yang dilakukan Cina dalam mengejar ketertinggalannya di bidang penanaman modal di

ASEAN. Ini merupakan wujud dari pencapaian cita-cita Cina dalam membangun perusahaan berkelas internasional dan berdaya saing tinggi.

Penandatanganan Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Cina ini menunjukkan adanya usaha perbaikan hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Selain itu, dengan masuknya Cina sebagai anggota kawasan perdagangan tersebut, maka akan memudahkan Cina untuk mengakses pasar lokal dan mempermudah akses Cina dalam menanamkan modalnya di negara-negara anggota, karena selain memiliki program AFTA-nya, ASEAN juga memiliki proyek lain dalam bidang penanaman modal, yaitu Area Investasi ASEAN (*ASEAN Investment Area / AIA*). Langkah ini merupakan langkah yang dijalankan Cina dalam menjalankan kebijakannya untuk mengekspor ODI-nya.

Secara umum, tujuan dari ODI tersebut antara lain untuk mengakses energi dan bahan mentah, memperoleh teknologi, merek dagang dan keterampilan, serta menghindari friksi perdagangan. Untuk kawasan ASEAN sendiri, adapun tujuan ODI Cina adalah untuk mengakses energi dan bahan mentah, serta menghindari friksi perdagangan. Sebagaimana diketahui, dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang menakjubkan, dewasa ini justru menyebabkan Cina mengalami peningkatan konsumsi energi. Selain itu, untuk menunjang pertumbuhan ekonominya, Cina juga membutuhkan beragam bahan mentah lainnya, seperti aluminium, tembaga, nikel, biji besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Untuk itu, Cina sangat memandang penting kawasan ASEAN sebagai salah satu kawasan pemasok bahan-bahan mentah yang sangat sedikit dihasilkan di negara tersebut.

Kasus friksi perdagangan merupakan masalah yang dihadapi dan cukup dikhawatirkan akan meningkat bila perusahaan-perusahaan Cina tidak mengucurkan atau mengekspansikan bisnisnya ke luar negeri. Perusahaan Cina dewasa ini, sedang menghadapi dilema yang cukup besar yaitu, adanya kompetisi perdagangan yang berlebih, penipisan kesempatan, dan overkapasitas pada banyak industri di pasar dalam negeri Cina, sehingga perusahaan Cina pun berupaya untuk menginvestasikan modalnya ke luar negeri sebagai langkah untuk menciptakan sebuah perusahaan berbasis luar negeri (multinasional). Hal ini dilakukan untuk dapat mempermudah

akses pasar lokal dan efisiensi ongkos produksi. Selain itu, dewasa ini di Cina pun terjadi overkapasitas pada barang-barang produksi seperti mesu cuci, kulkas, dan oven microwave sebesar 30%-40% dan mendekati 90% untuk televisi, sehingga memungkinkan pabrik-pabrik besar seperti Konka, Changhong, Huawei, dan TCL mengucurkan modalnya dengan mendirikan pabrik-pabrik baru di negara-negara ASEAN untuk memproduksi produk yang telah *overstocked* (kuantitasnya berlebih) di Cina. Pabrik-pabrik baru tersebut didirikan di luar negeri selain ditujukan untuk menghindari friksi perdagangan dan *overstocked*, juga ditujukan untuk tetap menjaga angka pertumbuhan ekspor Cina keluar negeri dengan cara 带料加工 *dailiao jiagong*, yaitu suatu proses investasi ke luar negeri dengan bahan-bahan yang diimpor dari Cina, terutama mesin-mesin, barang setengah jadi, dan sebagainya. ASEAN dipilih Cina karena selain secara geografis berdekatan dengan Cina, ASEAN juga memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi produk Cina dan kawasan ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup banyak untuk memberi pasokan memadai bagi kebutuhan industri Cina. Selain itu, di pasar dalam negeri ASEAN, Cina masih belum memiliki saingan yang cukup berarti dari produsen lokal.

III.2.2. ODI Cina di Indonesia Setelah Peningkatan Hubungan Cina-ASEAN

Setelah semakin meningkatnya hubungan antara Cina-ASEAN, hubungan antara Cina-Indonesia pun ikut makin meningkat. Peningkatan hubungan tersebut dapat dirasakan hampir di semua bidang, terutama di bidang ekonomi. Setelah, kejatuhan rezim Orde Baru, sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, hubungan antara Cina-Indonesia pun meningkat tajam. Adanya peningkatan kerjasama antara ASEAN dan Cina, ternyata cukup berimbang baik pada hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina, terutama setelah adanya Kerangka Kesepakatan

Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Cina. Peningkatan hubungan ini mengantarkan pula pada peningkatan kerjasama di berbagai bidang antara Cina-Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga dengan adanya peningkatan kerjasama di antara kedua negara ini, aliran ODI yang masuk ke Indonesia pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai macam perusahaan Cina yang masuk ke Indonesia.

Di dalam keanggotaannya, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan, sehingga Indonesia sering dianggap sebagai negara yang cukup penting keberadaannya baik di bidang politik maupun ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Cina pun memandang penting Indonesia dalam kaitannya dengan ASEAN, terlebih dalam bidang diplomasi untuk mendekatkan dirinya ke negara-negara ASEAN yang masih curiga pada Cina. Selain itu, Indonesia sendiri juga merupakan sebuah negara yang cukup berpengaruh di bidang ekonomi di kawasan tersebut, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang besar dengan modal ekonomi berlimpah berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Laju peningkatan hubungan diplomatik Cina-Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, ketika Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Sebelumnya, kendati telah dinormalkan, hubungan diplomatik Cina-Indonesia pada saat itu masih pada tahap yang tidak terlalu signifikan. Namun, ketika terjadinya kunjungan Gus Dur ke Cina jumlah perjanjian bersama kedua negara (MOU) dan persetujuan lain yang ditandatangani oleh Indonesia dan Cina sejak tahun 1999-2002 menunjukkan peningkatan yang berarti, menurut data dari KBRI di Beijing peningkatan hubungan kedua negara ini ditunjukkan dengan adanya beberapa MoU, sebagai berikut²⁴ :

1. MOU mengenai Bantuan Hibah dalam kaitan dengan Kerja sama Ekonomi dan Teknik ditandatangani di Jakarta, 28 Desember 1999;
2. MOU mengenai Kerja sama Bidang Kesehatan dan Kesepakatan Kerja sama Bidang Kesehatan ditandatangani di Beijing, 23 Februari 2000;

²⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/24/Fokus/805115.htm>, diakses pada 1 April 2008, pukul 01.00 WIB.

3. MOU mengenai Kerja Sama Penangkapan Ikan ditandatangani di Beijing, 23 April 2001, dilanjutkan dengan Kesepakatan Dua Pihak mengenai "Pemanfaatan Sebagian Kawasan Penangkapan Ikan yang Dbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" ditandatangani di Beijing, 19 Desember 2001;
4. Kesepakatan mengenai Pengangkut Laut ditandatangani di Jakarta, 5 Juni 2001;
5. MOU mengenai Kerja Sama Pertanian ditandatangani di Jakarta, 7 November 2001;
6. yang dilanjutkan dengan Pertemuan Komisi Gabungan Pertama tentang Kerja Sama Pertanian ditandatangani di Beijing, 18 September 2000;
7. Kesepakatan untuk Penghindaran Pajak Ganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal demi Pajak atas Pendapatan ditandatangani di Jakarta, 7 November 2001;
8. MOU sehubungan dengan Penguatan Kerja Sama dan Pertukaran Informasi antara Bank Indonesia dan *People's Bank of China* (Bank Sentral Cina) ditandatangani di Jakarta, 7 November 2001;
9. Persiapan bagi Rencana Implementasi Pelancongan Warga Cina ke Indonesia ditandatangani di Jakarta, 7 November 2001;
10. MOU mengenai Bantuan Hibah dalam Kaitan dengan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik ditandatangani di Beijing, 24 Maret 2002;
11. MOU mengenai Pendirian Forum Energi yang ditandatangani di Beijing pada 24 Maret 2002 yang dilanjutkan dengan Memorandum Bersama mengenai Forum Energi Indonesia dan Cina Pertama ditandatangani di Bali, 26 September 2002;
12. MOU mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Bidang Jembatan, Jalan Raya, dan Proyek Infrastruktur Lain ditandatangani di Beijing, 24 Maret 2002;

13. MOU mengenai Ikatan Jasa Penerbangan ditandatangani di Beijing, 25 Juni 2002;
14. MOU mengenai Kerja Sama Memerangi Perdagangan Ilegal Hasil Hutan ditandatangani di Beijing, 18 Desember 2002.

Dari serangkaian perjanjian kerjasama diatas, dapat dilihat bahwa untuk melancarkan strategi Cina dalam mengakses pasar dan bahan mentah, selain melancarkan strategi *Charm offensive*, Cina juga melakukan langkah “*Dollar Diplomacy*” terhadap Indonesia. Ini dilakukannya dengan cara memperbanyak kerjasama dalam berbagai bidang dan memberikan bantuan-bantuan yang kemudian akan mengantar Cina kepada akses untuk sumber daya energi dan bahan-bahan mentah lainnya yang dibutuhkan Cina dalam mendukung pembangunannya. Selain itu, pemerintah Cina juga berperan penting dalam pembangunan di Indonesia dengan memberikan bantuan hibah selama beberapa tahun ini termasuk pada bulan Nopember 2004 sebesar RMB 30 juta. Pemerintah Cina juga telah menyediakan *concessional loan* bagi beberapa proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek pembangunan Jembatan Suramadu, dengan jumlah total US\$ 550 juta. Secara spesifik, “*Dollar Diplomacy*” yang dilakukan Cina terhadap Indonesia tercermin pada perjanjian kerjasama energi Cina-Indonesia yang secara resmi di mulai ketika dibentuknya *Energi Forum* pada 24 Maret 2002. Pendirian *Energi Forum* tersebut merupakan momentum bagi kedua negara untuk mengembangkan kerjasama di bidang energi yang diharapkan akan menguntungkan Cina dari sudut pasokan kebutuhan akan migas dan juga menguntungkan Indonesia dari sudut investasi yang diharap dapat membantu perbaikan perekonomian di Indonesia.

Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang menyerap cukup banyak investasi dari Cina dalam bentuk non-finansial. Ini berarti bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak ketertarikan bagi Cina untuk berinvestasi di sektor non-finansial yang dapat berupa investasi bidang infrastruktur, transportasi, maupun perkebunan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka investasi non-finansial yang diserap Indonesia dari Cina cenderung meningkat walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2005. Pada tabel 3, bila

dilihat dari angka Net ODI tahun 2006 menunjukkan bahwa posisi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lain dalam menyerap ODI Cina menempati posisi kedua teratas setelah Singapura. Ini berarti bahwa Cina sangat memandang penting posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi di Asia.

Dilihat dari angka akumulasi bersih ODI Cina pada akhir tahun 2005 ke akumulasi bersih ODI Cina pada akhir tahun 2006, persentasenya cenderung meningkat sebesar 61,54%, bahkan persentase ini cenderung lebih besar dari angka Korea Selatan (51,83%) yang merupakan salah satu tujuan utama aliran ODI Cina di dunia (Lihat pada tabel 7 Bab 2). Singapura pun yang merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian terbesar di ASEAN sendiri pun, masih tertinggal jauh bila dilihat dari persentase akumulasi bersih ODI Cina tersebut, yaitu hanya sebesar 58,98%. Hal ini berkaitan erat dengan *Dolar Diplomacy* yang dilancarkan Cina ke negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk Indonesia. Ini terkait pula dengan adanya kebutuhan bahan tambang dan energi Cina dalam jumlah yang cukup besar beberapa tahun belakangan ini, bahkan menurut data dan laporan statistik Cina, sektor ODI Cina yang paling diminati dan memiliki angka yang cukup besar adalah sektor pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, teknologi informasi, retail, dan bisnis pelayanan jasa.²⁵ Sektor-sektor tersebut juga merupakan sektor penting yang dibutuhkan Cina dalam ODI-nya, sesuai dengan tujuan dari ODI Cina sendiri yang membutuhkan bahan mentah, keterampilan manajerial, dan menghindari adanya hiper-kompetisi dalam negeri.

Tabel 3
ODI Cina di Asia (Non-Financial)

Negara/ Wilayah	Net ODI 2004	Net ODI 2005	Net ODI 2006	US\$(10.000)	
				Akumulasi Net ODI akhir 2005	Akumulasi Net ODI akhir 2006
Hong Kong	262839	341970	693096	3650708	4226991
Indonesia	6196	1184	5694	14093	22551

²⁵中国统计年鉴2005/中华人民共和国国家统计局编，按行业分对外直接投资（非金融类），（北京：中国统计出版社，2005）。

Jepang	1530	1717	3949	15070	22398
Macao	2658	834	-4251	59870	61247
Singapura	4798	2033	13215	32548	46801
Korea Selatan	4023	58882	2732	88222	94924
Thailand	2343	477	1584	21918	23267
Vietnam	1685	2077	4357	22918	25363
Total	300027	437464	766324	4062904	4797805

Sumber: 中国统计年鉴2006/中华人民共和国国家统计局编
dan中国统计年鉴2007/中华人民共和国国家统计局编.

Dalam bidang energi, Cina memiliki kepentingan yang besar terhadap Indonesia mengingat potensi Indonesia dalam ketersediaan sumber daya energi tersebut, minyak dan gas, sangatlah besar. Investasi Cina ke Indonesia merupakan salah satu investasi yang memiliki nilai cukup besar, tercatat melalui data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan tahun 2004 Cina telah melakukan investasi di Indonesia dengan jumlah sebesar 6,5 milyar dollar AS. Dari jumlah tersebut, senilai 1,2 milyar dollar AS khusus dialokasikan untuk investasi di bidang migas Indonesia. Dari besarnya investasi tersebut bisa dikatakan bahwa Cina memang membutuhkan Indonesia sebagai pemasok energi mereka.²⁶ Sejak tahun 1990-1999, jumlah perjanjian kerjasama (MOU) antara Cina-Indonesia hanya berjumlah 12 perjanjian dan kemudian meningkat dalam waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2002 yang menghasilkan perjanjian kerjasama sebanyak 13 MOU.

Dari pertemuan dalam forum yang merupakan kelanjutan dari pembentukan *Energi Forum* tersebut, tanggal 2 September 2002, dihasilkan beberapa kerjasama yang antara lain, sebagai berikut²⁷:

1. Pengembangan pembangkit listrik di Palembang oleh China National Chemical Engineering dan China Cheng Da Chemical Engineering Co, yang dulu ditangani oleh PLN dan anak perusahaan PT Astra International Tbk;

²⁶ Dwijaya Kusuma, *China Mencari Minyak: Diplomasi ke Seluruh Dunia 1990-2007*, (Jakarta: Chinese Center Studies FIB UI, 2008), hal 84

²⁷ *Ibid*, hal. 87- 88.

2. Kesepakatan antara PLN dan China National Machinery & Equipment untuk membangun pembangkit listrik di Sibolga senilai 447 juta dollar AS;
3. Kesepakatan antara PLN dan China Machine Building International Corp untuk pengembangan pembangkit listrik di Kalimantan Barat senilai 246 juta dollar AS;
4. Kesepakatan antara PT Perusahaan Gas Negara dan CNOOC untuk membangun pipa gas terbesar di Indonesia yang menggandengkan Kalimantan Timur dan Jawa Timur senilai 1,7 milyar dollar AS;
5. Kesepakatan antara Sinopec dan PT Cahaya Putra Kencana untuk mengambil andil dalam beberapa ladang minyak di Sumatera Utara kesepakatan antara PT Bukit Asam dengan China National Technial Import Export Coporation untuk mengembangkan tambang batu bara di Ombilin, Sumatra Barat.

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia berupaya memanfaatkan hubungan luar negerinya agar dapat mengembalikan kepercayaan investor asing dan memperbesar investasi di Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi hubungan antara Cina-Indonesia. Dalam hubungan investasi langsung timbal balik Cina-Indonesia, berdasarkan sumber Cina terlihat investasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 nilai aktual investasi Indonesia di Cina sebesar US\$ 146,94 juta dengan 60 proyek, tahun 2001 nilai aktual investasi meningkat menjadi US\$ 159,64 juta dengan 82 proyek dan pada tahun 2002 nilai aktual investasi mencapai US\$ 14,12 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 94 buah. Sebaliknya, menurut data BKPM, investasi Cina di Indonesia di luar sektor Migas, Perbankan, Lembaga Non Bank, Asuransi dan Sewa Guna Usaha sering mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000, investasi Cina senilai US\$ 153.9 juta dengan 43 proyek dan pada tahun 2001, investasi Cina mengalami peningkatan secara drastis dengan nilai US\$ 6,054 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 34 buah. Peningkatan arus investasi Cina di Indonesia ini merupakan wujud nyata dari kebijakan Pemerintah Cina yang kian mendorong perusahaannya untuk melakukan investasi ke luar (*going-out strategy/go to the world*). Namun dalam tahun berikutnya (2002), investasi Cina menurun, juga secara drastis menjadi US\$ 58,8 juta dengan 41 buah

proyek karena kekhawatiran masalah keamanan di Indonesia. Dalam bidang migas, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan tender proyek menyediakan LNG ke Propinsi Fujian dengan nilai tender US\$ 8,5 milyar pada tahun 2002. Proyek ini akan mulai beroperasi pada 2006 dan akan menyuplai gas ke Cina selama 25 tahun.

Cina pada dasarnya memang menginginkan terciptanya kerjasama yang baik dengan Indonesia karena jika Cina telah berhasil menciptakan kerjasama tersebut secara baik maka akan banyak mendatangkan keuntungan tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi kedua negara. Dari sudut keamanan energi, Cina akan mendapatkan pasokan minyak yang cukup banyak dari Indonesia. Pada bulan April 2002, CNOOC berhasil menyelesaikan tindak lanjut terhadap rencana akuisisi terhadap Repsol YPF, perusahaan minyak asal Spanyol, yang memiliki total sebanyak 7 blok ladang minyak di Indonesia. Akuisisi itu sendiri berhasil membuat CNOOC menguasai 5 ladang minyak Repsol YPF dari total 7 ladangnya. Adapun kelima ladang minyak yang berhasil diakuisisi CNOOC adalah Lepas Pantai Utara Jawa Barat (36,72%), Bagian Barat Daya Sumatera (65,34%), Madura bagian Barat (25%), Poleng (50%), dan Blora (16,7%). Sedangkan 2 blok lainnya yang masih dikuasai Repsol YPF adalah di daerah Jambi Merang dan Sokang Selatan.²⁸

Pada tahun 2005, jumlah investasi Cina di Indonesia mencapai 84 proyek dengan nilai sebesar US\$205 juta dan berada pada urutan kedelapan setelah Singapura, Inggris, Jepang, Malaysia, Kanada, dan Belanda.²⁹ Data BKPM pada tahun 2007 menunjukkan, Cina berada di urutan kelima belas dalam hal realisasi investasi asing untuk periode Januari-September 2007, dengan nilai US\$19,8 juta. Untuk periode ini posisi Cina berada jauh di bawah Singapura (US\$ 3,32 milyar), Inggris (US\$1,67 milyar), dan Jepang (US\$535,6 juta). Data yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Indonesia menyatakan bahwa, tahun 2007 nilai investasi Cina di sektor nonmigas mencapai US\$272,3 juta yang tersebar dalam 109 proyek, meningkat 108,34% dibandingkan tahun sebelumnya.³⁰

²⁸ *CNOOC to complete Repsol-YPF Indonesia takeover by October*, diakses dari <http://www.gasandoil.com/goc/company/cns23627.htm>, pada tanggal 20 Mei 2009, pukul 21.25 WIB

²⁹ Antara, 18 Mei 2007.

³⁰ Sinar Harapan, (Kamis 15 Mei 2008)

III.3. ODI Cina di Indonesia Pasca ACFTA

Setelah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation*, yang merupakan kerangka kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan Cina dalam bentuk *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, ditandatangani pada tanggal 4 Nopember 2004 di Phnom Phen, Kamboja. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Cina cukup bagus dan Indonesia tercatat memiliki surplus perdagangan dengan Cina. Jika dibandingkan dengan sebelum penandatanganan perjanjian tersebut, surplus perdagangan Indonesia dengan Cina rata-rata hanya mencapai US\$608 juta pertahun, dan meningkat menjadi US\$ 1.160 juta pertahun, atau hampir dua kali lipat.

Arus investasi Cina ke Indonesia masih belum memiliki pengaruh yang besar. Justru, investasi negara negara ASEAN, Jepang, maupun Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi Cina ke Indonesia. Dari data BKPM ditunjukkan bahwa sebelum perjanjian ACFTA investasi negara-negara ASEAN ke Indonesia 18 kali lipat dengan rata-rata US\$ 559,83 juta dan 33 kali lipat setelah perjanjian ACFTA dengan nilai rata-rata US\$1.169,07 juta. Sedangkan rata-rata investasi Cina ke Indonesia sendiri hanya sebesar US\$32,43 sebelum perjanjian ACFTA dan menjadi rata-rata hanya sebesar US\$32,57 pasca ACFTA. Demikian juga persentase investasi Cina ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia masih kecil dan cenderung tidak ada peningkatan. Setelah perjanjian ACFTA realisasi ODI Cina di Indonesia hanya sebesar 0,6 % sedangkan sebelumnya juga hanya sebesar 0,6 %. Ini berarti walaupun Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi Cina untuk mengalirkan ODI-nya, akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dari pihak Cina sendiri dalam menanamkan ODI-nya di Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, semestinya pemerintah Indonesia lebih agresif dan tidak tinggal diam, terlebih setelah adanya pernyataan dari Wen Jiabao dalam Forum Boao untuk lebih berperan dalam dunia investasi Asia Tenggara.

Tabel 4
Perkembangan Realisasi Investasi Cina ke Indonesia tahun 2001-2007

(US\$ juta)

Negara	Tahun							
	2002	2003	2004	Rata-rata	2005	2006	2007	Rata-rata
ASEAN	299,2	464,1	916,2	559,83	2.250,0	926,7	330,5	1.169,07
Cina	6	83,2	8,1	32,43	37,3	31,5	28,9	32,57
Jepang	432,3	738,2	1.041,30	737,27	1.144,3	908,2	210,4	754,30
Amerika Serikat	60,3	148,4	78,3	95,67	88,6	65,8	123,5	92,63
Total Dunia	3.091,2	5450,6	4601,3	4381,0	8914,6	5976,9	3706,0	6199,2
% Inv. Cina ke Indonesia	0,19	1,52	0,17	0,6	0,42	0,53	0,78	0,6

Sumber Data: BKPM

Langkah yang dapat ditempuh, bisa saja dengan segera merealisasikan forum investasi, yang nantinya mengkoordinir semua kepentingan dengan jalan mengundang sebanyak mungkin investor Cina untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Forum ini juga berfungsi sebagai penghubung antara investor Cina dengan pemerintah pusat, swasta, serta seluruh Pemda Indonesia. Menurut, Duta Besar Indonesia untuk Cina Sudrajat, sebagian besar pengusaha Cina masih pemula yang masuk ke pasar Indonesia sehingga mereka membutuhkan fasilitasi dan layanan yang baik guna mendorong realisasi investasi mereka. Oleh karena itu, ia meminta kerjasama kalangan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi dan memberi kemudahan. Sudrajat juga menyatakan bahwa sebagian besar pengusaha Cina membidik sumber bahan baku primer yang ada di Indonesia untuk kelangsungan industri mereka.³¹ Kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha-pengusaha yang ingin menginvestasikan modalnya ke Indonesia antara lain pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat, dan kurang memadainya infrastruktur di Indonesia.³² Saat ini, masalah yang paling signifikan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya pasokan listrik untuk keperluan industri. Walaupun Sekjen Depperin Agus Tjahajana menuturkan untuk mendorong kinerja industri nasional, pemerintah memberikan

³¹ Antara, Kamis 15 Mei 2008

³² Tempo Interaktif,

insentif investasi berupa fasilitas PPh seperti dituangkan dalam PP No. 62/2008. Insentif itu diberikan untuk sejumlah sektor tertentu a.l. Industri kimia, TPT, alat angkut, mesin dan peralatan, hingga besi dan baja, yang dikembangkan di daerah tertentu.³³ Namun, kesiapan infrastruktur serta kondisi dunia usaha Indonesia yang memang peranan lebih penting dalam menangkap peluang yang masih terbuka lebar untuk merealisasikan dan mengeksplorasi berbagai kegiatan yang ada dalam perjanjian ACFTA tersebut.

Adanya ACFTA sendiri sebenarnya memberikan pengaruh besar bagi kedua negara, terutama Indonesia. Adanya ACFTA ini memungkinkan pula bagi investor Cina untuk menanamkan modalnya bagi Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia pun dapat terus bertumbuh di tengah fenomena merosotnya perekonomian beberapa negara di dunia belakangan ini. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sangat membutuhkan Cina dalam mendukung stabilitas perekonomiannya pula. Apalagi setelah anjloknya harga-harga saham di beberapa negara, sehingga menyebabkan saling ketergantungan pula diantara kedua negara tersebut. Indonesia yang membutuhkan Cina dalam hal mendukung stabilitas perekonomiannya, dan Cina yang juga membutuhkan Indonesia dalam hal pasokan bahan mentah dan menghindari hiper-kompetisi pasar dalam negerinya, sehingga hubungan kedua negara tersebut saling menguntungkan. Setelah melihat kecenderungan yang terjadi pada ODI Cina, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat berpeluang dalam menyerap ODI yang dikucurkan tersebut, sehingga dengan begitu Indonesia pun dapat belajar dari Cina bagaimana mengembangkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk dapat berkompetisi pula di dunia Internasional. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dari penerimaan investasi sendiri ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki modal, teknologi tinggi, dan kemampuan manajerial yang terbatas, sehingga Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar dapat tumbuh dan bersaing.

³³ <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/manufaktur/lid90436.html>